



ENERGIZE TO TRANSFORM

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah yang dilakukan dalam jangka panjang, yakni selama 20 (dua puluh) tahun mendatang, diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini. Gambaran keadaan pada masa depan yang diinginkan tersebut sering disebut sebagai visi jangka panjang, visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh lapisan masyarakat.

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD. Dalam penyusunan ini, tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian permasalahan yang sering disebut sebagai isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

4.1 VISI

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan salah satu butir upaya dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang



menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam melakukan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan RPJMD yang dikembangkan pada tahap periode tersebut. Visi berikut ini juga memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal (perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional, dsb) baik berupa peluang maupun tantangan.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**.

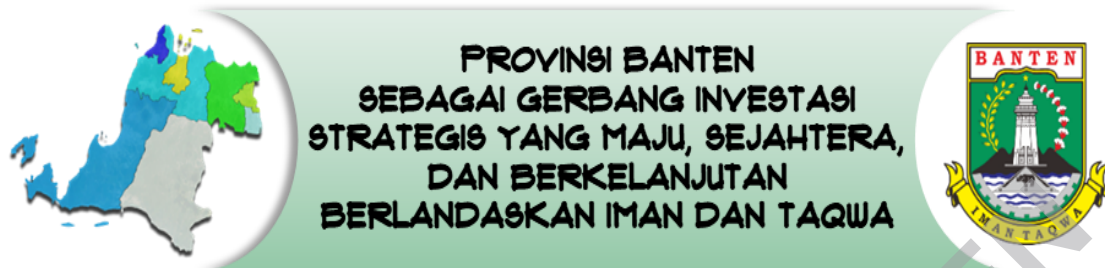
Perumusan pokok-pokok visi didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan Banten dan mencermati Visi **Indonesia Emas 2045**. Permasalahan utama yang sudah diidentifikasi antara lain: (1) sumber daya manusia yang belum berkualitas, (2) pembangunan ekonomi yang belum optimal, (3) tata kelola pemerintahan yang belum optimal; dan (4) manajemen tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal. Perumusan pokok-pokok visi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1
Perumusan Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	MASALAH UTAMA	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1	Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas	Maju dan Sejahtera	Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
2	Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal	Investasi	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Iman dan Taqwa	berlandaskan Iman dan Taqwa
4	Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal	Maju dan Berkelanjutan	

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dengan berlandaskan pemikiran tersebut, serta menyikapi terhadap visi Indonesia guna pencapaian Indonesia Emas di Tahun 2045 maka visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten tahun 2025-2045 adalah:



Gambar IV.1
Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024)

Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Provinsi Banten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

INVESTASI

Provinsi Banten sebagai gerbang investasi merupakan cerminan dari posisi geostrategis Banten yang merepresentasikan keunggulannya atas akses yang mudah terhadap sumberdaya, pasar, dan juga pelayanan, yang sekurang-kurangnya ditandai dengan 3 hal, sebagai berikut:

i. **Penyangga Ibukota Negara**

Banten merupakan wilayah penyangga ibukota negara, yakni Jakarta yang merupakan jantung pemerintahan dan perekonomian nasional. Hal ini menjadikan berbagai pelayanan dan urusan yang terkait dengan investasi yang berhubungan dengan Jakarta akan menjadi efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya.

ii. **Akses terhadap Pasar Nasional**

Indonesia dengan 259 juta jiwa penduduk merupakan sebuah potensi pasar yang besar, dimana konsentrasi utama persebaran penduduk adalah 62,1% di Pulau Jawa dan 16,2% di Pulau Sumatera, sementara Banten adalah simpul penghubung antara kedua pulau besar tersebut.



iii. Akses terhadap Jaringan Internasional

Banten memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ke arah utara memiliki tendensi dengan wilayah Asia Pasifik dan Amerika, sedangkan ke arah barat memiliki 5 tendensi dengan wilayah Asia Barat, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Australia.

 **MAJU**

Prinsip pembangunan daerah yang maju dilihat dari segi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045 untuk dapat mencapai posisi lima besar dunia. Pencapaian cita-cita ini ditandai dengan basis sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi yang berdaya saing, menciptakan kapasitas sumber daya manusia yang tangguh, pengembangan infrastruktur, dan adopsi teknologi yang mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan pendapatan per kapita masyarakat Banten dapat terwujud. Selain itu juga kapasitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas.

 **SEJAHTERA**

Seluruh masyarakat Banten dapat terjamin kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi. Pada tahun 2045, kesejahteraan masyarakat Banten dengan kualitas SDM yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur secara kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan.



BERKELANJUTAN

Provinsi Banten berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial masyarakat Banten melalui penggunaan sumber daya alam yang efisien dan efektif. Sehingga pembangunan-pembangunan yang dilakukan dapat tetap menjaga kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan yang asri dan lestari, serta lingkungan permukiman layak dan nyaman tak berpolusi untuk memberikan dampak kebaikan bagi penerus masa datang.

IMAN DAN TAQWA

“Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini serta menjadikan masyarakat yang pribadi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama yang kokoh. Dalam perjalanan hingga tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, tidak lupa bahwa segenap hal tersebut harus dilandaskan pada jati diri, yaitu “Iman dan Taqwa” seperti yang terdapat pada lambang Provinsi Banten. Peran iman dan taqwa sangat penting dalam membangun karakter generasi muda, sebagai kunci keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten, yang berperan aktif sebagai kekuatan moral serta agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Terciptanya kondisi masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis disertai dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal akan sangat mendukung kinerja pembangunan.

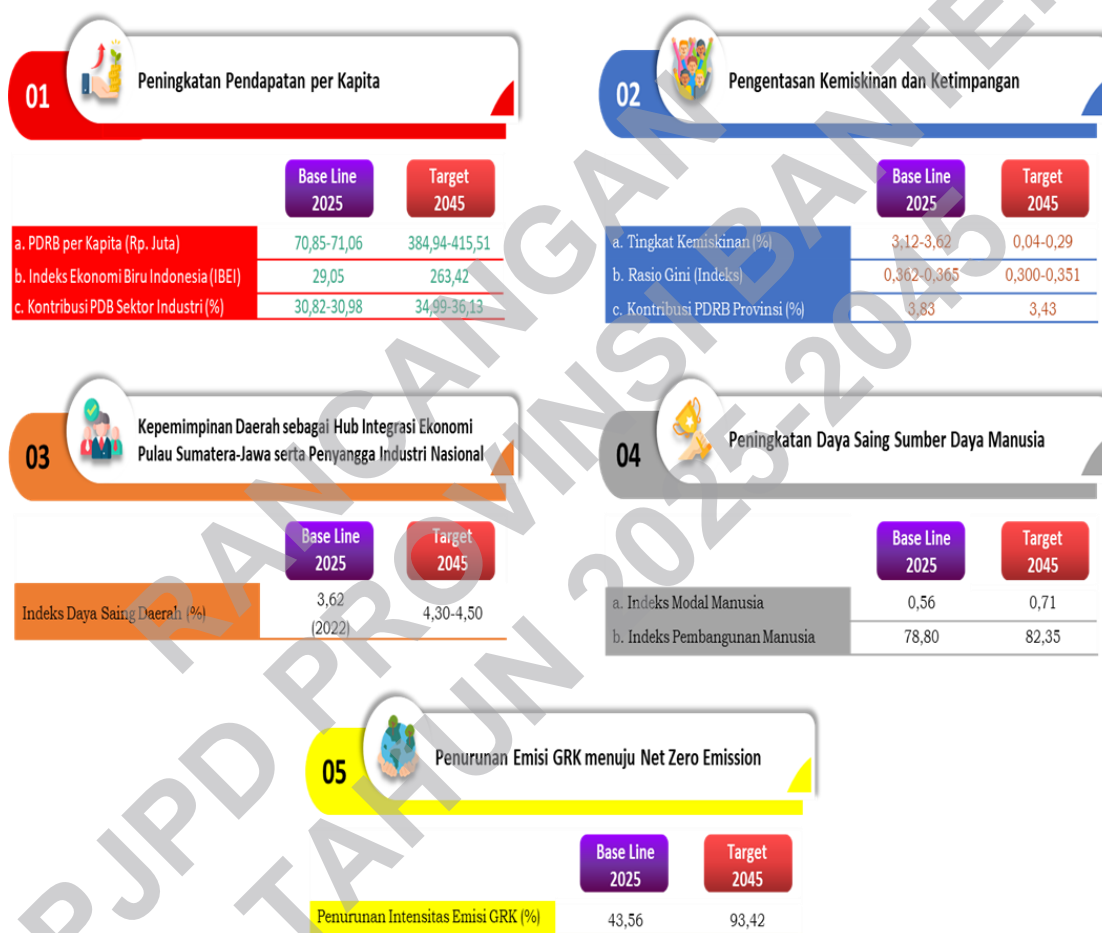
Tabel IV.2
Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

Visi RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju , dan Berkelanjutan	Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju , Sejahtera, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa

Sumber: Hasil Olahan, 2024

4.1.1 SASARAN VISI

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission.



Gambar IV.2
Sasaran Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024)

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta terwujudnya **Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa**, maka untuk dapat merefleksikan hal tersebut telah ditentukan 5 (lima) Sasaran Utama beserta indikator dan targetnya diantaranya adalah:



**Tabel IV.3
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD
Provinsi Banten Tahun 2025-2045**

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045				RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045				
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE LINE 2025	TARGET 2045	
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	a. GNI Perkapita (USD)	5.500	23.000	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per Kapita (Rp. Juta)	70,85	348,94	
				-			-		-
				30.300				71,06	415,51
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,60	15,00		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	29,05	263,42	
		c. Kontribusi PDB Marnufaktur (%)	20,80	28,00		c. Kontribusi PDB Sektor Industri (%)	30,82	34,99	
2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0	0,5	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,12	0,04	
			-	-			-	-	
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377		b. Rasio Gini (Indeks)	0,362	0,300	
				-			-	-	
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2021)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,365	0,351	
							3,83	3,43	
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyengga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,60 (2023)	4,30	
								4,50	
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	a. Indeks Modal Manusia	0,56	0,71	
						b. Indeks Pembangunan Manusia	78,80 (2023)	82,35	
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	43,56	93,42	

Sumber: Hasil Olahan, 2024

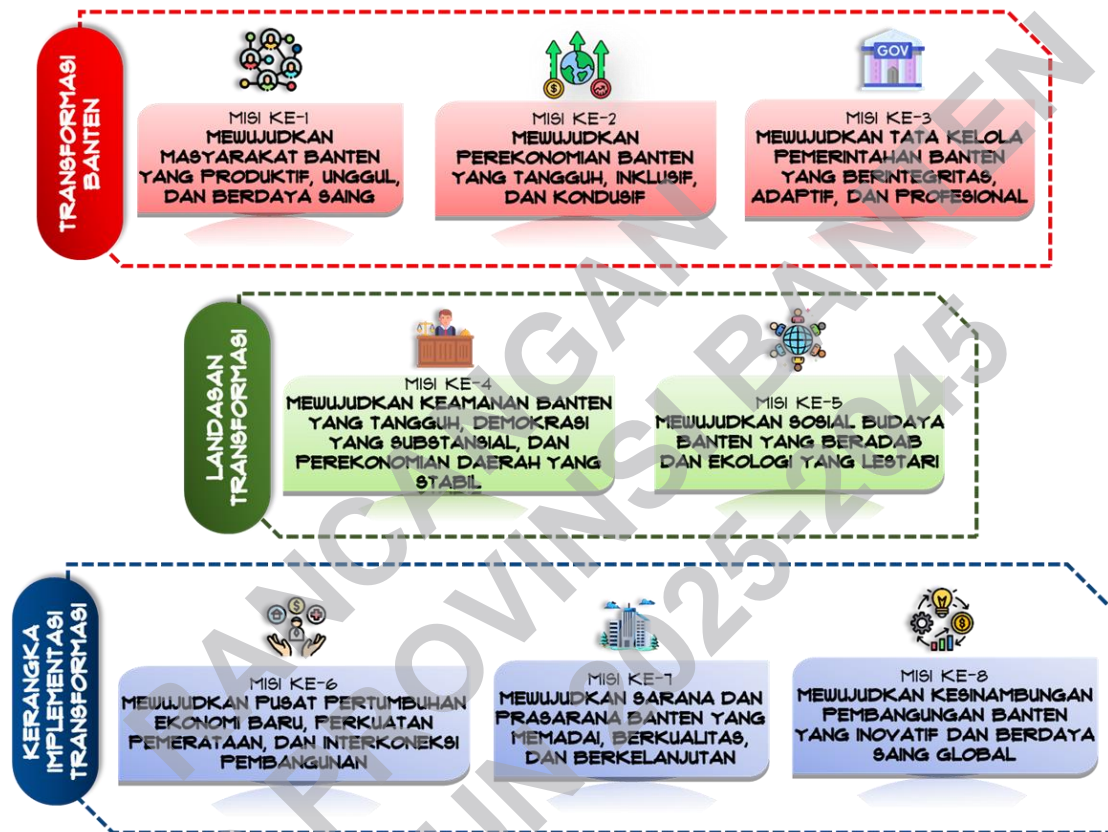
4.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJPD Provinsi Banten hingga Tahun 2045. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Perumusan misi pembangunan Provinsi Banten mengacu pada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab permasalahan sebelumnya dan evaluasi (rekomendasi) dari RPJPD

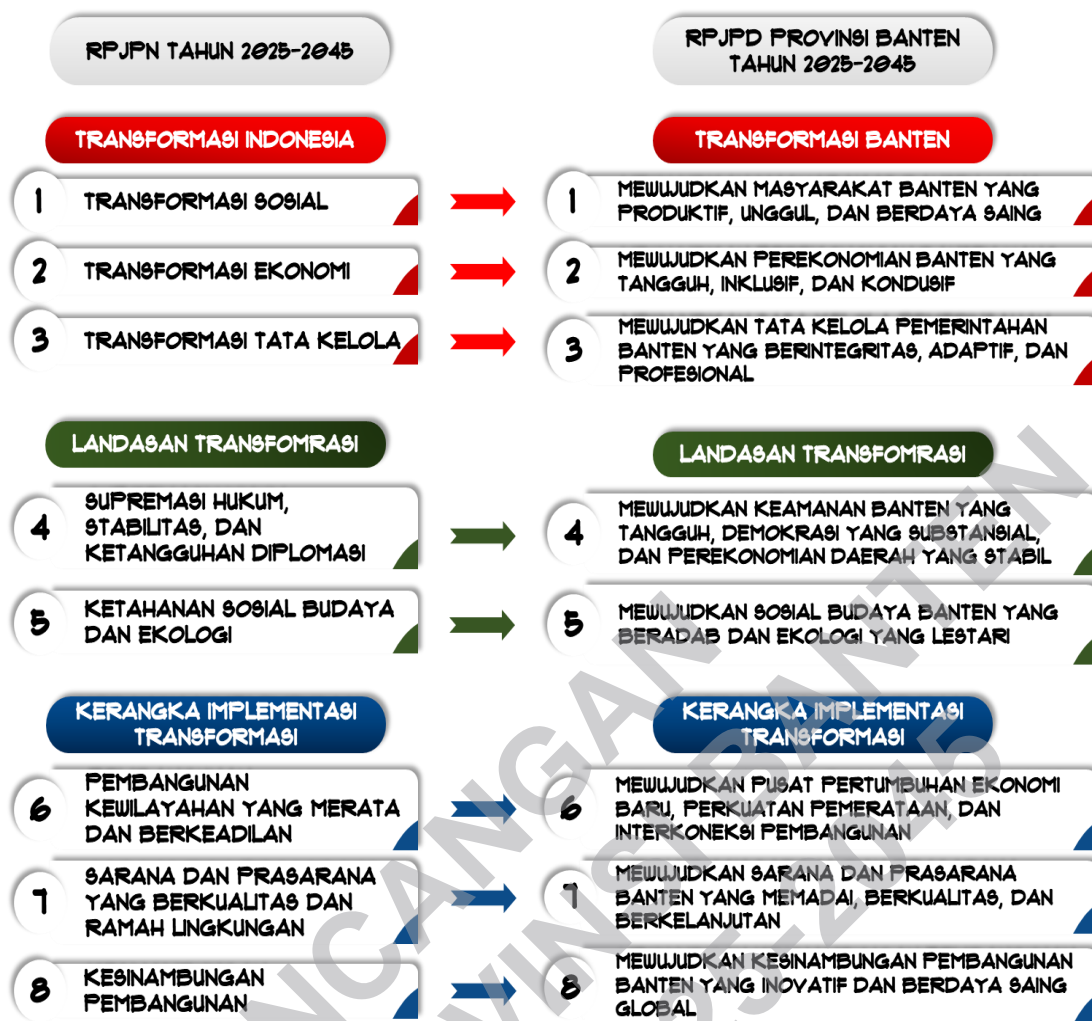


Provinsi Banten, serta yang tidak kalah pentingnya mempertimbangkan pewujudan Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana Visi yang telah dijelaskan di awal, untuk dapat terwujudnya Provinsi Banten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa untuk dapat mencapai Indonesia Emas di 2045 maka disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan yang terdiri dari:



Gambar IV.3
Misi Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024)



Gambar IV.4
Penyelarasan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024)

4.2.1 MISI KE-1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANTEN YANG PRODUKTIF, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING

Pada misi pertama terdiri dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memajukan tingkat pendidikan masyarakat, serta meningkatkan perlindungan sosial yang optimal. Kualitas kesehatan masyarakat penting ditingkatkan melalui pemenuhan jaminan kesehatan, infrastruktur dan proses pelayanan kesehatan yang optimal serta meningkatkan kesehatan kualitas lingkungan. Sementara itu, upaya penting dalam memajukan, tingkat pendidikan masyarakat antara lain meningkatkan kebijakan pendidikan dasar beserta implementasinya dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai lokal yang baik dan positif, serta meningkatkan pemenuhan infrastruktur pendidikan dasar. Upaya dalam meningkatkan perlindungan sosial yang optimal diwujudkan dalam sistem



perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan.

4.2.2 MISI KE-2, MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN BANTEN YANG TANGGUH, INKLUSIF, DAN KONDUSIF

Pada misi kedua terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, mendorong potensi ekonomi lokal khususnya sektor-sektor unggulan serta mengoptimalkan inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan investasi. Upaya ini penting dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal dan kemampuan memproduksi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu menciptakan nilai tambah dengan kegiatan mereka sendiri. Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan kondusif dilakukan dengan berbagai cara seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau; transformasi digital; integrasi ekonomi domestic dan global serta mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 MISI KE-3, MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BANTEN YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN PROFESIONAL

Pada misi ketiga terdiri dari upaya mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana parasana pemerintahan. Selain itu juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah agar lebih optimal; peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah; serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah meningkatkan



regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif didorong dengan berbagai inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang dinamis.

4.2.4 MISI KE-4, MEWUJUDKAN KEMANANAN BANTEN YANG TANGGUH, DEMOKRASI YANG SUBSTANSIAL, DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG STABIL

Upaya yang ada dalam misi ini untuk mewujudkan keamanan Banten yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan perekonomian daerah yang stabil dilakukan dengan berbagai upaya menciptakan hukum yang berkeadilan, keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang substansial; pengendalian perekonomian di daerah untuk menciptakan perekonomian makro yang stabil serta ketangguhan diplomasi dan keamanan daerah yang berdaya gentar kawasan

4.2.5 MISI KE-5, MEWUJUDKAN SOSIAL BUDAYA BANTEN YANG BERADAB DAN EKOLOGI YANG LESTARI

Upaya yang ada dalam misi ini untuk mewujudkan sosial budaya Banten yang beradab dan ekologi yang lestari melalui kebijakan yang mengarahkan pada sosial budaya untuk menciptakan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dan menciptakan keluarga yang berkualitas, masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusif. Upaya yang tidak kalah penting bagaimana untuk dapat menciptakan lingkungan hidup berkualitas melalui peningkatan konservasi dengan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, yang dipadukan dengan upaya pelibatan stakeholder dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

4.2.6 MISI KE-6, MEWUJUDKAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU, PERKUATAN PEMERATAAN, DAN INTERKONEKSI PEMBANGUNAN

Upaya yang ada di dalam misi ini untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan dengan berbagai cara meliputi, akselerasi pertumbuhan perekonomian berbasis komoditas unggulan Banten yang memiliki



nilai tambah tinggi, kondusifitas iklim investasi, keterhubungan wilayah Banten dengan infrastruktur yang memadai dan merata, pertumbuhan ekonomi sirkular (ekonomi hijau dan biru sesuai potensi wilayah), diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama antar berbagai *stakeholder*. Serta tidak kalah pentingnya yaitu kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat berkesetaraan *gender* yang dapat mengakses pendidikan untuk menciptakan masyarakat berdaya saing dan kemudahan untuk mengakses lapangan kerja.

4.2.1 MISI KE-1, MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA BANTEN YANG MEMADAI, BERKUALITAS, DAN BERKELANJUTAN

Upaya yang ada di dalam misi ini terkait dengan kemampuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, menciptakan manfaat diberbagai lini sektor pembangunan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan adil terhadap akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana Banten yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan yang diharapkan tidak ada lagi timbul kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045.

4.2.8 MISI KE-8, MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN BANTEN YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL

Upaya yang ada di dalam misi ini untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Banten yang inovatif dan berdaya saing global melalui serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”** sebagai mengawal pencapaian **Indonesia Emas 2045** dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih lanjut untuk mencapai impian-impian yang tertuang dalam dokumen ini, perumusan



perencanaan juga diarahkan dengan memformulasikan secara SMART, target jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai kondisi yang ada (*relevan*) dan waktu yang jelas (*time*).

Kesinambungan perencanaan dan pembangunan menjadi penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan agar seluruh tahapan pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan yang disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko, khususnya dalam menghadapi perubahan mendasar yang memerlukan suatu perkuatan dan implementasi serta pembiayaan pembangunan yang inovatif. Upaya inovatif pembiayaan pembangunan melalui akselerasi pencarian sumber pendanaan yang sesuai aturan yang tidak memberatkan Provinsi Banten dalam mencapai target-target yang diturunkan ke daerah.

RANCANGAN
RPJPD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2045



ENERGIZE TO TRANSFORM

BAB V

**ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK**



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Sebagaimana yang telah disinggung di awal, bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan yang dibagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan pembangunan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh daripada itu arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

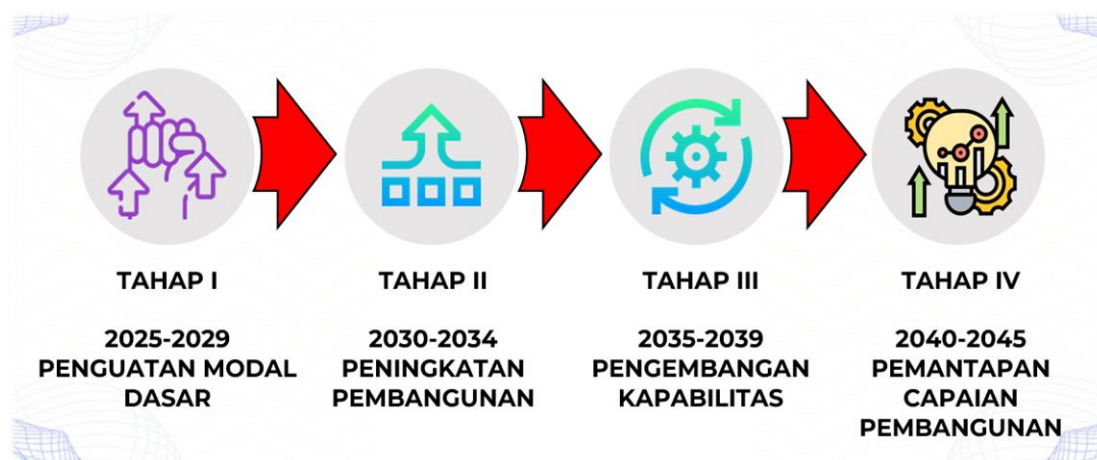
Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Banten terdapat berbagai rekomendasi arah kebijakan untuk RPJPD Banten 2025-2045, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi; (2) peningkatan kualitas SDM dengan



penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang; (4) penguatan strategi pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana; serta (5) penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan.

Lebih lanjut, sesuai RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”** telah merumuskan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan region Pulau Jawa yang berkaitan dengan arah perencanaan pembangunan Provinsi Banten. Beberapa arah kebijakan dalam dokumen tersebut untuk pembangunan daerah Banten, yaitu: (1) Banten Utara diarahkan untuk pengembangan industri hijau ramah lingkungan; (2) pengembangan kawasan strategis industri; (3) pemanfaatan ALKI I di Wilayah Selat Sunda untuk menghubungkan rantai pasok domestik dan global yang terpadu; (3) peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali dengan pengembangan Merak-Bakauheni; (4) percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan utamanya pada kawasan afirmasi di Jawa termasuk Banten Selatan.

Fokus kebijakan dalam penentuan arah kebijakan sebagai tema makro pembangunan setiap periode yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan ini merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD, maka berikut arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045:



Gambar V.1
Pentahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024)

5.1.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1.1.1 TAHAP I TAHUN 2025-2029, PENGUATAN MODAL DASAR

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pada tahap periode pertama ini, Penguatan Modal Dasar pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode pertama RPJPN 2025-2045 berupa Perkuatan Fondasi Transformasi.

5.1.1.2 TAHAP II TAHUN 2030-2034, PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun pertama, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan peningkatan proses pembangunan. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui



peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial; peningkatan investasi dan penanaman modal dan pengoptimalan produktivitas UMKM daerah; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; pengembangan diversifikasi dan konservasi energi; pengembangan kerjasama multipihak antar lembaga; dan penguatan fungsi infrastruktur di kawasan perkotaan dan perdesaan. Pada tahap periode kedua ini, Peningkatan Pembangunan pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode kedua RPJPN 2025-2045 berupa Akselerasi Transformasi.

5.1.1.3 TAHAP III TAHUN 2035-2039, PENGEMBANGAN KAPABILITAS

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun kedua, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kapabilitas daerah. pengembangan kapabilitas daerah. Pengembangan kapabilitas diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengembangan agrotechnopark; pengoptimalan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara, serta pengembangan kawasan perdesaan. Pada tahap periode ketiga ini, Pengembangan Kapabilitas pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode ketiga RPJPN 2025-2045 berupa Ekspansi Global.

5.1.1.4 TAHAP IV TAHUN 2040-2045, PEMANTAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun ketiga, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan pemantapan capaian pembangunan. pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui pemantapan kondisi lingkungan belajar sebagai pengoptimalan kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah; pemantapan inovasi yang berdaya

saing tinggi; pemantapan pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup; pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah; pemantapan kualitas desentralisasi fiskal; dan pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah. Pada tahap periode keempat ini, Pemantapan Capaian Pembangunan pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode keempat RPJPN 2025-2045 berupa Perwujudan Indonesia Emas.

5.1.2 ARAH KEBIJAKAN MISI RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

5.1.2.1 MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANTEN YANG PRODUKTIF, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING

Untuk dapat mewujudkan Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing telah dirumuskan arah kebijakan pertahapan pembangunan sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini, yang mana arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya.



Gambar V.2
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-1 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Hasil Olahan, 2024)

5.1.2.2 MISI 2, MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN BANTEN YANG TANGGUH, INKLUSIF, DAN KONDUSIF

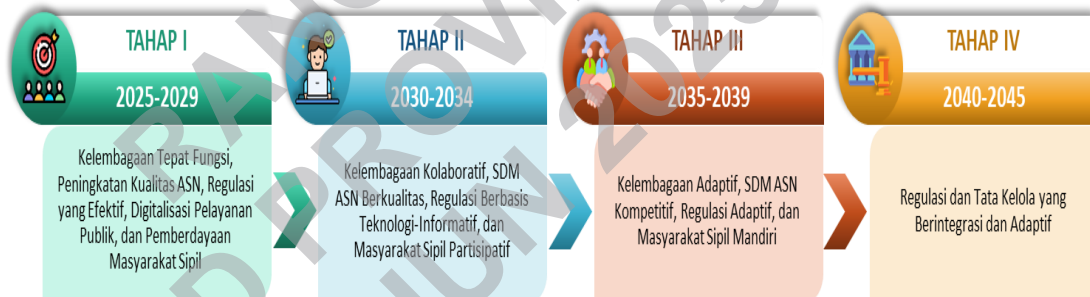
Untuk dapat mewujudkan Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif telah dirumuskan arah kebijakan pertahapan pembangunan sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini, yang mana arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya.



Gambar V.3
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-2 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Hasil Olahan, 2024)

5.1.2.3 MISI 3, MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BANTEN YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN PROFESIONAL

Untuk dapat mewujudkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional telah dirumuskan arah kebijakan pertahapan pembangunan sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini, yang mana arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya.



Gambar V.4
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-3 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Hasil Olahan, 2024)

5.1.2.4 MISI 4, MEWUJUDKAN KEMANANAN BANTEN YANG TANGGUH, DEMOKRASI YANG SUBSTANSIAL, DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG STABIL

Untuk dapat mewujudkan Mewujudkan Kemananan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil telah dirumuskan arah kebijakan pertahapan pembangunan sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini, yang mana arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya.



Gambar V.5
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-4 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Hasil Olahan, 2024)

5.1.2.5 MISI 5, MEWUJUDKAN SOSIAL BUDAYA BANTEN YANG BERADAB DAN EKOLOGI YANG LESTARI

Untuk dapat mewujudkan Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradab dan Ekologi yang Lestari telah dirumuskan arah kebijakan pertahapan pembangunan sebagaimana gambar dan tabel di bawah ini, yang mana arah kebijakan ini guna mencapai 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan pada sub bab selanjutnya.



Gambar V.6
Pentahapan Arah Kebijakan Misi ke-5 RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Hasil Olahan, 2024)



Tabel V.1
Arah Kebijakan Misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa	Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	Pemenuhan sarana prasarana, pembiayaan kesehatan dan tenaga kesehatan pada pelayanan dasar kesehatan serta Sistem pelayanan kesehatan berbasis digital	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk	Peningkatan Upaya Kesehatan dan Penguatan Sistem kesehatan berbasis teknologi	Pemantapan kualitas hidup keluarga pada seluruh siklus kehidupan untuk menciptakan manusia yang berdaya saing dan inovatif
		Pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data pelayanan kesehatan ibu dan anak	Penguatan kerjasama multisektor dalam pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pemantapan kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar
		Pemenuhan Kualitas SDM dan pengelolaan data dalam Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan upaya promotif preventif melalui intervensi sensitif dan spesifik dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Kerjasama dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dengan lembaga non pemerintah	Menjaga kecukupan gizi keluarga untuk menuju new zero stunting
		Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM dalam penemuan kasus dan pengelolaan data TBC secara digital	peningkatan upaya penemuan dan pengobatan kasus TBC melalui penguatan pendampingan keluarga dan masyarakat	Akselerasi keberlanjutan penemuan dan pengobatan kasus TBC pada seluruh lapisan masyarakat	Penguatan keberlanjutan pengobatan Pasien TBC sesuai Standar
		Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pengobatan TBC melalui lintas program dan lintas sektor	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dalam mendukung keberhasilan pengobatan TBC	Penguatan kerjasama multisektor dalam keberhasilan pengobatan TBC	Peningkatan Pengendalian penyakit TBC pada wilayah dengan beban tinggi
		Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat	Penyediaan Jaminan kesehatan nasional yang cukup dan berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan Standar Pelayanan Minimal	Menjaga kecukupan jaminan kesehatan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun melalui ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan diversifikasi layanan pendidikan	Peningkatan kualitas, sertifikasi dan distribusi guru dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, berbasis komunitas, dan non formal	Penguatan pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi data pendidikan untuk inovasi pembelajaran	nasional yang adil, efektif dan efisien Pemantapan kualitas pembelajaran melalui penguatan kurikulum adaptif dan asesmen komprehensif melalui integrasi <i>soft skills</i> , <i>social skills</i> dan <i>life skills</i>
		Penguatan kurikulum dan tenaga kependidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis softskill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	Peningkatan akses dan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis softskill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	Pemerataan pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis softskill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah yang bertaraf global
		Pemenuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pembelajaran	Penguatan kualitas, efisiensi biaya dan penataan lembaga pendidikan	Penguatan ekosistem pembelajaran melalui diversifikasi layanan pendidikan	Pemantapan kualitas pembelajaran berdasarkan potensi dan minat bakat anak
		Peningkatan akses pendidikan menengah atas berkualitas serta peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2033/4	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	penguatan kompetensi dan keahlian baru	Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan	Penguatan diseminasi akses dan informasi lembaga pendidikan tinggi berkualitas bagi pelajar tingkat menengah	Penguatan pemanfaatan anggaran pendidikan, pemanfaatan sumber dana inovatif dan dana abadi pendidikan, dan penerapan strategi pendanaan pendidikan yang berkeadilan	Pengembangan <i>center of excellence</i> bagi pelajar daerah yang memiliki tingkat intelinjensi unggul yang disertai dukungan informasi dan sumber pendanaan
	Penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan kapasitas instruktur yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru kewirausahaan	Penguatan keselarasan sarana dan prasarana pembelajaran bidang keahlian sesuai kebutuhan DUDI melalui penguasaan keterampilan sains dan teknologi	Dukungan kerjasama penelitian dan kemitraan DUDI melalui peningkatan kompetensi bagi peningkatan peserta didik	Pemantapan kelembagaan dan sistem pembelajaran berstandar industri Abad 21	
	Penjaminan bantuan sosial terhadap pembiayaan pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal layak bagi masyarakat rentan	Peningkatan dan kemudahan masyarakat rentan dalam mengakses lembaga pendidikan formal dan non formal dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas diri	Peningkatan akses masyarakat terhadap dunia kerja	Pemantapan penuntasan kemiskinan pada masyarakat rentan	
	Peningkatan kesadaran terhadap hak atas perlindungan sosial bagi masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat	Pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat Banten menuju universal social protection	
	Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan	Pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja bagi kelompok penyandang	Pemerataan dan perluasan penyediaan jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian dan	Pemantapan kelompok penyandang disabilitas berdaya saing global yang	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		kesempatan kerja di sektor formal bagi kelompok penyandang disabilitas	disabilitas yang berdaya saing global dan tersertifikasi	jaminan hari tua bagi kelompok penyandang disabilitas	memiliki kesempatan kerja di sektor formal
	Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	Penyediaan ruang, peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan power supply untuk menarik investor	Peningkatan industri berorientasi ekspor untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan daya saing daerah.	Peningkatan riset dan inovasi di sektor industri dan adaptasi terhadap proses dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas.	Pemantapan regulasi, SDM, riset dan inovasi sektor manufaktur untuk meningkatkan daya saing daerah.
		Penguatan integrasi konektivitas pariwisata domestik dan global yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif	Penguatan <i>ease of doing business</i> pada investasi pariwisata	Penguatan <i>trademark</i> dan diferensiasi atraksi wisata berdasarkan kekhasan daerah bercitra rasa global	Pemantapan amenitas pada destinasi wisata sesuai standar global
		Penguatan integrasi dan daya saing promosi pariwisata dan investasi yang didukung oleh sumber daya manusia pariwisata berdaya saing global	Peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman, atraksi alam dan budaya yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi wilayah	Penguatan budaya ramah wisatawan pada masyarakat	Pemantapan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan berbasis digitalisasi dan teknologi
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan	Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing berdasarkan hak kekayaan budaya dan intelektual	Pengembangan hub ekonomi kreatif dan klaster ekonomi kreatif dan digital yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif, global dan berkelanjutan	Pemantapan pertumbuhan <i>stratup</i> kreatif dan digital berbasis seni dan budaya Banten sebagai <i>trendsetter</i> nasional dan global
		Penguatan data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian	Perluasan kesempatan berusaha melalui penguatan sinergi riset dan industri besar dalam hilirisasi mother industri	Penyediaan akses ruang bagi usaha kecil dan menengah pada kawasan industri	Pemantapan kolaborasi pendanaan dan pemasaran melalui integrasi dan partisipasi dalam rantai pasok



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-2033/4	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Pengembangan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	Penguatan dan pemertaan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi	domestik dan rantai pasok global Pemantapan industri kecil dan menengah yang berdaya saing menghasilkan produk menuju ekspansi global
		Penguatan budaya, iklim, dan karakter wirausaha sejak usia dini dan pada lembaga kependidikan	Pengembangan skema rekrutmen dan insentif melalui <i>talent pool</i> , pemagangan industri, dan beasiswa	Penguatan regulasi dan standarisasi lembaga pembinaan kewirausahaan yang adaptif dengan trend global	Penguatan peran lembaga riset, industri, dan lembaga pembiayaan dalam pembinaan calon wirausaha baru
		Penguatan data dan sistem informasi, dan kejelasan sasaran pembinaan koperasi berdasarkan standar klasifikasi	Penguatan akses permodalan, pemasaran, dan pembinaan bagi koperasi	Penguatan koperasi non simpan pinjam melalui skema bapak asuh dengan industri atau lembaga perguruan tinggi	Penguatan pembinaan, regulasi, dan standarisasi koperasi yang adaptif dengan trend global
		Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas <i>good governance</i>	Pemanfaatan <i>idle aset</i> daerah untuk dikelola oleh BUMD yang memiliki nilai ekonomis untuk penguatan pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah	Penguatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset pada BUMD	Pemantapan kinerja BUMD dalam pengelolaan aset menuju zero iddle capacity aset bernilai ekonomis
		Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system	Peningkatan pelatihan re-skilling dan up-skilling bagi angkatan kerja dengan memanfaatkan teknologi seperti keterampilan digital	Peningkatan Fasilitasi Mobilitas Pekerja untuk mengisi pasar kerja global	Peningkatan Lapangan Kerja Menengah ke Atas di sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital
		Pengurangan praktek diskriminasi gender dan Penguatan kesadaran	Peningkatan pelatihan re-skilling dan up-skilling bagi angkatan kerja perempuan	Dukungan Fasilitasi Mobilitas Pekerja perempuan untuk mengisi pasar kerja	Pengadvokasian tempat kerja ramah perempuan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		kesamaan hak dalam akses pekerjaan kepada masyarakat	dengan memanfaatkan teknologi seperti keterampilan digital		pada dunia usaha dan dunia industri
	Penguatan fondasi dan arah kebijakan penataan kelembagaan dan regulasi pengembangan daya saing daerah dan inovasi daerah		Penyiapan talenta talenta riset yang unggul dan berdaya saing global	Percepatan pengembangan penerapan riset, inovasi dan daya saing daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global
	Peningkatan Efisiensi dan Percepatan Transisi Energi menuju Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		Penguatan dalam transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru	Penerapan Ekonomi Sirkular	Pemantapan penerapan Ekonomi Hijau di semua sektor
	Penerapan Konservasi dan Diversifikasi Energi		Penyediaan energi untuk Kebutuhan Daerah	Peningkatan Penyediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah	Pemantapan dalam Pemanfaatan hasil Transisi Energi Baru Terbarukan
	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam pemanfaatan TIK untuk mengurangi Kesenjangan Digital	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan bersama swasta dan komunitas dalam rangka pengembangan dan implementasi TIK.	Pemantapan Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Publik dan Pengembangan Ekonomi Digital.
	Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan serta penciptaan ekosistem logistik yang efisien		Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien dan penguatan daya saing pusat pertumbuhan KI dan KEK	Penguatan logistik daerah melalui pemanfaatan teknologi digital	Pemantapan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi menuju logistik 4.0
	Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi		Penguatan promosi investasi	Penguatan citra Provinsi Banten sebagai destinasi investasi pilihan melalui kondusifitas daerah dan perkonomian	Penguatan pelayanan investasi melalui pembinaan konseling, perizinan, dan pendampingan
	Penguatan infrastruktur fisik mencakup ports, roads, dan power supplies		Penguatan infrastruktur sosial seperti angkatan kerja	Penguatan fasilitasi di sisi keuangan untuk kredit perdagangan ekspor dan	Penguatan partisipasi Provinsi Banten dalam rantai pasok global



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
			yang well trained dan terdidik di bidang ekspor impor	mendukung produksi barang ekspor	
		Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi guna meningkatkan iklim investasi, mendorong ekonomi domestik dan kepastian berusaha	Peningkatan perkotaan sebagai hub ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan perkotaan sebagai hub ekonomi melalui integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa	Pemantapan perkotaan berdaya ungkit tinggi terintegrasi intra dan antar pusat pertumbuhan di tingkat regional dan nasional maupun global
		Peningkatan hunian layak berbasis <i>green and smart infrastructure and resilience</i>	Peningkatan hunian <i>compact</i> yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, kesehatan, transportasi, rekreasi, dsb (<i>walkable city</i>)	Peningkatan kota kolaboratif dan inovatif	Pemantapan kota layak huni yang inklusif dan berkelanjutan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional		Peningkatan kompetensi perancang produk hukum daerah	Penguatan koordinasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	Peningkatan evaluasi dan penyederhanaan produk hukum daerah	Pengoptimalan implementasi produk hukum daerah dalam pelayanan publik
		Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintahan	Penguatan Perencanaan Rumusan Kebijakan Implementasi e-government	Pengembangan collaborative governance dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi e-government	Optimalisasi Pemanfaatan e-government dalam seluruh pelayanan publik
		Penguatan kebijakan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme SDM	Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan media konsultasi dan pengaduan	Pemantapan inovasi sistem informasi pelayanan publik berbasis digital
		Peningkatan kapasitas aparaturnya pengawasan pemerintahan daerah	Penguatan internalisasi integritas pada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemantapan kinerja pengawasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mewujudkan Kemananan Banten yang	Peningkatan Rumusan Kebijakan terkait Pembangunan Hukum	Penguatan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan	Peningkatan pemenuhan akses dan terjaminnya masyarakat dalam menerima	Pemantapan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
	Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil		penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM	hak atas aspek sipil dan politik serta hak atas aspek ekonomi, sosial dan budaya	berhasil memenuhi HAM secara adil dan merata
		Peningkatan Rumusan Kebijakan Terkait Trantibumlinmas	Penguatan Kapasitas Aparatur dan Sarana Prasarana Pendukung Trantibumlinmas	Penguatan Evaluasi Implementasi Kebijakan Trantibumlinmas	Pemantapan Trantibumlinmas yang Berkelanjutan
		Harmonisasi Kelembagaan Demokrasi	Pembangunan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kenegaraan yang Berdaulat	Perlindungan Kesetaraan dan Keadilan Hak Asasi Manusia	Pemantapan Ketahanan Nasional Daerah
		Penguatan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak swasta/stakeholder lainnya dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah	Peningkatan tax base (types of goods and services subject to tax) serta manajemen pengelolaan pajak daerah	Pemantapan pengelolaan pajak daerah yang efektif, cepat dan aman melalui inovasi digitalisasi
		Penguatan koordinasi antarlembaga yang memiliki peran pengendalian inflasi di Provinsi Banten	Penguatan ketersediaan stok pangan dan kelancaran distribusi rantai pasok pangan	Penguatan keterjangkauan harga pangan dan melakukan komunikasi yg efektif.	Penguatan edukasi terhadap masyarakat terkait inflasi
		Penguatan peran Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoordinasikan berbagai stakeholders Dana Pihak Ketiga	Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan Dana Pihak Ketiga	Penguatan SDM di sektor perbankan	Penguatan digitalisasi mendukung peningkatan dana pihak ketiga
		Peningkatan literasi dana pensiun	Penguatan SDM di sektor dana pensiun	Penguatan koordinasi antar stakeholders	Pemantapan digitalisasi mendukung peningkatan aset dana pensiun
		Peningkatan literasi pasar saham	Penciptaan ekosistem pasar saham tingkat Provinsi Banten	Penguatan koordinasi antar stekholders	Pemantapan digitalisasi ekosistem pasar saham di Provinsi Banten
		Peningkatan literasi kredit	Penguatan SDM di sektor keuangan	Penguatan koordinasi antar stekholders	Pemantapan digitalisasi mendukung peningkatan kredit



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		Penguatan profil keuangan masyarakat	Peningkatan edukasi keuangan inklusi	Penguatan koordinasi dengan berbagai skateholders	Pemantapan peran digitalisasi dalam inklusi keuangan
		Penguatan perencanaan kerjasama sister province dan peninjauan kerjasama	Penguatan fasilitasi kerjasama di berbagai bidang	Penguatan Skema kerjasama serta tindaklanjut hasil Kerjasama	Pemantapan pemanfaatan hasil Hubungan kerjasama Pemerintah Provinsi
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Ekonomi	Mengurangi Kesenjangan dan meningkatkan Pemerataan Infrastruktur, Konektivitas dan Pemberdayaan Masyarakat lokal	Peningkatan Daya Saing melalui Inovasi, Riset dan Pengembangan	Pemantapan pembangunan Mental dan Budaya yang kuat
	Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradab dan Ekologi Lestari	Penguatan regulasi, perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan kebudayaan, Cagar Budaya dan Permuseuman	Pengembangan dan pelestarian sarana dan prasarana kebudayaan, Cagar Budaya dan Permuseuman	Pemanfaatan aset budaya sebagai landasan moral budipekerti dan perekonomian masyarakat	Pembinaan kesadaran berkebudayaan secara berkelanjutan
		Peningkatan Rumusan Kebijakan terkait Implementasi Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Kolaborasi antara Stakeholder dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Penegakan terhadap Pelanggaran Kerukunan Umat Beragama
		Peningkatan pemahaman dalam membangun keluarga dan peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga harmonis	Penguatan pemberdayaan keluarga sebagai motor penggerak pembangunan	Pemantapan kondisi keluarga yang harmonis
		Internalisasi kesetaraan gender dalam pembangunan	Penguatan kapasitas gender dalam partisipasi pembangunan	Pengotimalan upaya pemberdayaan manusia berbasis gender	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
		Peningkatan kebijakan, inisiasi (tujuan dan rencana), identifikasi dan	Peningkatan ekosistem keanekaragaman hayati melalui identifikasi,	Penguatan partisipasi, kolaborasi dan pengembangan pembiayaan	Pemantapan inovasi pengelolaan keanekaragaman hayati



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		inventarisasi pengelolaan keanekaragaman dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati	inventarisasi, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal, kekhasan ekosistem, spasial dan kekayaan spesies	inovatif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	berbasis konservasi dan preservasi
		Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi Laut, dan Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Pengendalian kualitas air, tanah, dan udara serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan teknologi sebagai sarana pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup	Pemantapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan
		Peningkatan advokasi, edukasi, sosialisasi penyehatan lingkungan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi aman yang terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan kelembagaan dan optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi infrastruktur sanitasi	Peningkatan pemerataan percepatan layanan akses sanitasi aman	Pemantapan dan optimalisasi layanan dan fasilitas sanitasi aman secara layak dan berkelanjutan
		Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah, jaringan pengangkutan sampah dan keterlibatan antar daerah melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Penerapan teknologi berkelanjutan untuk minimasi sampah dari sumber penghasil sampah serta peningkatan retribusi mendukung pembiayaan persampahan	Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah dan pemantapan koordinasi antar lembaga	Pemantapan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku menuju gaya hidup berkelanjutan serta mewujudkan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis
		Peningkatan literasi dan paradigma masyarakat	Pemerataan sistem pengelolaan sampah yang	Peningkatan keterlibatan masyarakat, penguatan	Pemantapan pelayanan pengelolaan dan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		terhadap pengelolaan sampah di sumber serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan circular economi masyarakat	berkelanjutan, efektif dan efisien serta peningkatan infrastruktur dalam pengumpulan sampah yang terintegrasi didukung sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah	kelembagaan, dan koordinasi antar stakeholder dalam penanganan sampah	penanganan sampah yang berkelanjutan
		Ekplorasi dan pengembangan energi baru terbarukan serta penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	Peningkatan riset, inovasi teknologi dan kolaborasi pemanfaatan energi baru terbarukan	Pemantapan Provinsi Banten yang aktif berperan terhadap transisi energi berkelanjutan melalui perwujudan bauran energi berfokus terhadap energi baru terbarukan dan pembangunan rendah karbon
		Penguatan ketahanan energi rendah emisi dengan mewujudkan transisi energi berbasis potensi lokal yang terjangkau dan inklusif	Peningkatan pemanfaatan energi rendah emisi bagi sektor strategis maupun industri	Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam pemanfaatan energi	Pemantapan pemanfaatan energi primer untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman dan kualitas pangan melalui intensifikasi, penggunaan teknologi dan diversifikasi produk untuk menjamin kecukupan pangan	Penerapan teknologi baru, pengembangan produk pangan dan jaringan distribusi dalam upaya meningkatkan standar pangan yang sampai kepada masyarakat	Peningkatan kerjasama dalam pengembangan jaringan distribusi, keterjangkauan dan ketersediaan produk pangan dalam rangka menjamin kemandirian pangan	Pemantapan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan diversifikasi produk untuk kemandirian pangan yang berkelanjutan
		Peningkatan ketersediaan air baku melalui pengelolaan dan pemulihan	Peningkatan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM dan	Peningkatan implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan	Pemantapan akses air minum yang dikelola secara aman dengan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		DAS kritis, kawasan resapan air, dan pengelolaan limbah yang terintegrasi serta penyediaan aturan kelembagaan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM	inovasi penerapan <i>polluter pays principle</i> sebagai pembebanan biaya terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha	pengelolaan lingkungan hidup dan implementasi sistem peringatan dini kualitas air	menerapkan teknologi terkini dan inovasi dalam penerapan insentif dan disinsentif
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air siap minum	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum serta pemerataan akses layanan air siap minum	Percepatan pemerataan infrastruktur air baku dan air minum serta akses layanan air siap minum	Pemantapan wilayah strategis di Provinsi Banten yang terakses layanan air siap minum
		Penguatan regulasi harmonis, peningkatan tata kelola risiko bencana yang sinergis pusat dan daerah, dan peningkatan masyarakat terhadap pemahaman risiko dan adaptasi perubahan iklim serta kabupaten/kota yang tangguh bencana dan perubahan iklim secara inklusif dan partisipatif	Peningkatan masyarakat terhadap pemahaman risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas SDM kebencanaan yang memiliki keahlian berstandar dan profesional dalam penanganan tanggap darurat dan pasca bencana, kabupaten/kota yang tangguh bencana dan perubahan iklim secara inklusif dan partisipatif dan kemandirian teknologi dan akses layanan peringatan dini multi ancaman bencana	Peningkatan masyarakat terhadap pemahaman risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, kabupaten/kota yang tangguh bencana dan perubahan iklim secara inklusif dan partisipatif, pembiayaan penanggulangan bencana berbasis manajemen risiko serta SDM kebencanaan yang memiliki keahlian berstandar dan profesional dalam penanganan darurat bencana dan perwujudan iklim	Pemantapan Provinsi Banten yang maju dan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, perubahan	Peningkatan pengendalian tata ruang dengan mempertimbangkan risiko	Peningkatan perbaikan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko	Pemantapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030-20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
		iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah-wilayah yang berpotensi sedang hingga tinggi terjadi bencana	bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah-wilayah yang berpotensi sedang hingga tinggi terjadi bencana	bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah-wilayah yang berpotensi sedang hingga tinggi terjadi bencana	bencana, perubahan iklim, dan pertimbangan ekologi lainnya khususnya pada wilayah-wilayah yang berpotensi sedang hingga tinggi terjadi bencana
		Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan nature-based solution sebagai upaya adaptasi-mitigasi krisis iklim dan pengoptimalan rehabilitas lahan dalam rangka pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan faktor risiko bencana dan krisis iklim	Peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan dan pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana dan krisis iklim yang efektif, efisien, andal dan terintegrasi	Pemantapan kolaborasi pentahelix yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan krisis iklim

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2 SASARAN POKOK

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran ini dijabarkan menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20 (dua puluh).

Sasaran pokok ini digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dan dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan yang dijembatani oleh arah kebijakan. Selain daripada itu, sasaran pokok disusun dengan merujuk terhadap hasil pemetaan masalah serta berbagai dokumen dan kebijakan yang ditelaah (RTRW, KLHS, kebijakan nasional dan provinsi). Sasaran pokok ini diturunkan dari setiap misi serta terdapat indikator kinerja sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan kondisi yang akan dicapai. Berikut disajikan rumusan sasaran pokok terhadap RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045.

5.2.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah di Provinsi Banten. Dari 8 (delapan) misi (agenda) yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang bersifat transformatif yang dituangkan sebagai Indonesia Emas (IE) 1 sampai dengan IE 17. Guna mengjewantahkan dan dukungan Provinsi Banten terhadap mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 maka disusunlah arah pembangunan daerah dengan menyelaraskan terhadap muatan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini.



Tabel V.2
Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	RPJPN TAHUN 2025-2045		RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN
1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk Semua IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE5. Penerapan Ekonomi Hijau IE6. Transformasi Digital IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE5. Penerapan Ekonomi Hijau IE6. Transformasi Digital IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE11. Stabilitas Ekonomi Makro IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Mewujudkan Keamanan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE11. Stabilitas Ekonomi Makro IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gentar Kawasan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradab dan Ekologi Lestari	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Olahan, 2024

5.2.2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Untuk itu disusunlah arah kebijakan transformasi dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan menyelaraskan terhadap muatan dalam BAB V RPJPN Tahun 2025-2045 tentang Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3

Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai standar untuk menciptakan manusia yang berdaya saing dan inovatif Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).</p> <p>Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</p> <p>Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</p> <p>Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah</p> <p>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> <p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p>		<p>tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan).</p> <p>Pemenuhan Kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting serta TBC melalui lintas program dan lintas sektor</p> <p>Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk menuju new zero stunting</p> <p>Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang inklusif)</p> <p>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas untuk pendidikan menengah atas</p> <p>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> <p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, ramah disabilitas, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah</p> <p>Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan menengah atas berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
		<u>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</u>		<u>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</u>
		<u>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</u>		<u>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</u>
		<u>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</u>		<u>Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru kewirausahaan</u>
		<u>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</u>		<u>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</u>
		<u>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>		<u>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>
		<u>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>		<u>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>
		<u>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)</u>		<u>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)</u>
		<u>Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global</u>		<u>Pemantapan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global dengan dukungan Pemerintah Pusat</u>
		<u>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>		<u>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</u>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan) melalui bertambahnya demand		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan) melalui bertambahnya demand
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan,		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan,



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</p> <p>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan</p>		<p>bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p> <p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</p> <p>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan</p>
2	Transformasi Ekonomi	<p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Banten Utara (Cidanau-Ciujung-Cidurian)</p>	Transformasi Ekonomi	<p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Banten Utara (Cidanau-Ciujung-Cidurian) dan Banten Selatan (Ciliman-Cisawarna-Cilemer-Pasir Eurih)</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)		Pemantapan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi inovasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah		Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, penguatan ease of doing business pada investasi pariwisata dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasiskan hak kekayaan budaya dan intelektual
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak</p> <p>Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan</p> <p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan</p> <p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, pengindraan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif</p> <p>Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya</p> <p>Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah</p>		<p>kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak</p> <p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform</p> <p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak</p> <p>Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan</p> <p>Penyediaan ruang, infrastruktur esensial terintegrasi (jalan, pelabuhan, power supply, dsb) bagi upaya membangkitkan minat investor, peningkatan produktivitas perikanan, dan daya saing produk perikanan</p> <p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, pengindraan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif</p> <p>Modernisasi kapal, sarana, dan prasarana produksi perikanan serta inovasi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan</p> <p>Peningkatan riset dan inovasi dalam penyediaan instrumen pengendali hama, obat, pakan ramah lingkungan dan ekonomis untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perikanan budidaya</p> <p>Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri consumer goods & general manufactures)		yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri logam dasar, industri petrokimia, industri makanan dan minuman, industri mesin, industri tekstil, industri consumer goods & general manufactures)
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan penguatan logistik daerah yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Serang
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Serang
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Serang
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan Pemantapan antraksi, amenities, aksesibilitas dan ansilari pada destinasi wisata sesuai standar global serta peningkatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara inovatif, kolaboratif dan partisipatif disesuaikan dengan preferensi wisatawan dan potensi keunggulan wilayah
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha		Penguatan kepariwisataan daerah melalui budaya ramah wisatawan, diferensiasi atraksi dan trademark wisata berdasarkan kekhasan daerah yang bercitra rasa global



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif		serta kolaboratif pemasaran pariwisata dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha berbasis digital
		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)		Peningkatan hub ekonomi kreatif melalui konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan kluster ekonomi kreatif yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda)
		Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Banten untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Rangkasbitung-Panimbang; dan - Panimbang-Muarabinuangeun		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa untuk mendukung peningkatan perkotaan sebagai hub kluster ekonomi yang unggul dan berdaya saing
		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek		Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Banten untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Rangkasbitung-Panimbang; dan - Panimbang-Muarabinuangeun
		Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rangkasbitung-Pandeglang (termasuk elektrifikasi dan jalur ganda)		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Rangkasbitung-Merak.		Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Rangkasbitung-Pandeglang (termasuk elektrifikasi dan jalur ganda)
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Banten/Ciwandan		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Rangkasbitung-Merak.
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Banten/Ciwandan/Bojonegara dan Cigading
				Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta		metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global melalui penguatan sinergi riset dan industri besar dalam hilirisasi mother industri, pengembangan skema rekrutmen dan insentif melalui talent pool, pemagangan industri, dan beasiswa
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya melalui hunian compact yang terintegrasi antar fungsi tempat tinggal, kantor, kesehatan, transportasi, rekreasi, dsb (walkable city)
		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon		Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi		Industrialisasi koperasi melalui pemantapan regulasi, peningkatan SDM yang berkesetaraan gender, hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi riset dan inovasi teknologi baru berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui pembinaan bagi koperasi, peningkatan dan penguatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan/permodalan dan pemasaran), penerapan teknologi digitalisasi dan kemitraan usaha
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya		Pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III) TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045) TRANSFORMASI
	<p data-bbox="608 386 981 410">Peningkatan produktivitas BUMD</p> <hr/> <p data-bbox="608 521 1248 1149">Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p> <hr/> <p data-bbox="608 1157 1236 1360">Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung</p>	<p data-bbox="1584 386 2227 516">Peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas good governance, penguatan karakter budaya wirausaha, penguatan iklim bisnis, kejelasan regulasi serta pelaksanaan pembinaan sesuai standar global</p> <hr/> <p data-bbox="1584 521 2237 1125">Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p> <hr/> <p data-bbox="1584 1157 2245 1360">Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
3	Transformasi Tata Kelola	<p>kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)</p> <p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Banten, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Banten yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>Penguatan integritas partai politik</p>	Transformasi Tata Kelola	<p>perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)</p> <p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Banten, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Banten yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan provinsi</p>
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),</p>	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan provinsi</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
	stabilitas ekonomi makro daerah	<p>penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan <u>penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional</u></p> <p>Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut</p> <hr/> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah</p> <p>Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan)</p>	stabilitas ekonomi makro daerah	<p>penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan <u>penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional</u></p> <p>Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut sesuai kewenangan provinsi serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat</p> <hr/> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah</p> <p>Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Banten Selatan) sesuai kewenangan provinsi serta dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat</p>
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan kepada Pancasila</p> <hr/> <p>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</p> <p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis <u>wilayah kesatuan lanskap ekologis</u></p> <hr/> <p>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami</p> <hr/> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</p>	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan nilai kebudayaan Banten dalam jati diri dan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila</p> <hr/> <p>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</p> <p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis <u>wilayah kesatuan lanskap ekologis</u></p> <hr/> <p>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami</p> <hr/> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dengan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Pusat</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</p> <hr/> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <hr/> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <hr/> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</p> <hr/> <p>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p> <hr/> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</p>		<p>Peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</p> <hr/> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <hr/> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <hr/> <p>Penguatan pengarusutamaan dan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam partisipasi pembangunan</p> <hr/> <p>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p> <hr/> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</p>
6	Implementasi Transformasi	<p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah</p> <hr/> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)</p> <hr/> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</p> <hr/> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna</p>	Implementasi Transformasi	<p>Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah</p> <hr/> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)</p> <hr/> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir</p> <hr/> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM LAMPIRAN SEB BUKU II BAGIAN III)		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045)	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
		menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas		rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria		Percepatan pelaksanaan reforma agraria
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim		Penegakan mitigasi struktural terhadap standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim serta penguatan kapasitas masyarakat, mittigasi non struktural, dan sistim peringatan dini bencana
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance		Pemantapan pelaksanaan pemerintahan melalui pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional		Pemantapan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Sumber: Hasil Olahan, 2024



5.2.3 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terdapat 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, disusun indikator utama RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yang memperhatikan terhadap substansi muatan indikator utama RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.4
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045**

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJPD PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54
2	Kesehatan ibu dan anak			Kesehatan ibu dan anak		
	a). Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115,0	16,0	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77,00	10,00
	b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,50	5,00
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274,0	76,0	Penanganan Tuberkulosis:		
				a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91,00	100,00
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,00	100,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,50
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		
	a) Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a-i Membaca	396,0	485,0	i) Literasi Membaca	9,09	69,66
					-	-
					11,09	71,66
	a-ii Matematika	404,0	490,0	ii) Numerasi	0,00	61,50
					-	-
					2,00	63,50



NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJP PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
	a-iii Sains	416,0	487,0	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minum pada asesment:		
				i) Literasi Membaca	29,35	65,23
					-	-
					31,35	67,23
				ii) Numerasi	17,34	61,02
					-	-
					19,34	63,02
	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,00	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86	12,49
					-	-
					-	12,52
	c) Harapan Lama Sekolah	13,37	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31	14,72
					-	-
					13,32	14,77
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,84	9,84
					-	-
					-	10,26
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,69	75,00
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29
9	Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,03 (Tahun 2022)	92,52
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	30,0	60,0	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26	65
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,82	34,99
					-	-
					3,62	36,13
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata:		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,40	4,07
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18,0	100,0	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	496,89	1.242,23



NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJPD PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,43	0,51
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0	a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,90	18,52
	b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0	a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,33	10,00
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,11	3,95
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	12,50
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	5,69
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,40-7,10	6,30-7,20
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,70	61,60
	a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3	Tingkat Penguasaan IPTEK		
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar	Indeks Inovasi Daerah (%)	56,92/ Inovatif (Tahun 2023)	85/ Sangat Inovatif
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	57,58	73,90
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,0	70,0	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,0	72,2
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51,0	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,30	7,80
20	Biaya Logistik (% PDB)	16,9 (2019)	9,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	6,4	4,4
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	34,40	32,30
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26,0	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33,60	55,00



NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJPD PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
23	Kota dan Desa Maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolis terhadap nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)	31,1 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)
	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	64,0	100,0	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,08	100,00
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	Target akan ditentukan kemudian		Persentase Desa Mandiri (%)	Target akan ditentukan kemudian	
24	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	89,70	100,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,39 (2023)	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (2022)	5,00
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,74	87,63
	a) Indeks Integritas	71,94 (2022)	96,98			
	b) Indeks Persepsi Korupsi	34,0	60,0			
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	75-100 (Peduli HAM)	75-100 (Peduli HAM)
29	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	55,29	72,67



NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJPD PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0 - 20,0	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	2,50	5,00
32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi	3,30-3,70	1,10-3,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200,0	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	33,34	77,20
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60,0	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,13	3,70
	c) Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20,0	c) Nilai Transaksi Saham per Provinsi berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	32.732,80	161.441,85
	d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120,0	d) Total Kredit/PDRB (%)	25,00	66,80
	e) Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90			
34	Inklusi Keuangan (%)	91,0	98,0	Inklusi Keuangan (%)	91,83	99,02
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4 (2023)	75,0 - 80,0	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/ <i>sister province</i> (Jumlah)	-	8,00
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2023)	45,0	Indeks Ketahanan Nasional	Cukup Tangguh	Sangat Tangguh
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,81 - 51,82	63,08 - 63,56
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68 - 70,77	76,92 - 77,91
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,76	74,75 - 74,78
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,44	0,22-0,21
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,524	0,626
42	Kualitas Lingkungan Hidup:			Kualitas Lingkungan Hidup:		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)	76,12	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,76	53,90
	b) Rumah Tangga dengan	12,5	70,12	b) Rumah Tangga dengan Akses	16,00	70,00



NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPN TAHUN 2025-2045		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045	
		TARGET RPJP NASIONAL			TARGET RPJPD PROVINSI BANTEN	
		BASELINE 2025	TARGET 2045		BASELINE 2025	TARGET 2045
	Akses Sanitasi Aman (%)			Sanitasi Aman (%)		
	c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	4,98 (2022)	90,00
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi		
	- Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.520,00	3.270,00
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	200,00	170,00
	b) Prevalensi ketidacukupan pangan (%)	6,2	2,1	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	2,46	0,51
	c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air		
	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	0,99	15,73
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,46	100,00
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,21 (2022)	117,77 - 94,94
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a) Kumulatif	28,12	51,51	a) Kumulatif	2,26	25,42
	c) Tahunan	32,65	80,98	c) Tahunan	8,93	70,70

Sumber: Hasil Olahan, 2024



**Tabel V.5
Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045**

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	TARGET		KETERANGAN			
				BASELINE 2025	TARGET 2045				
1	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas serta pengembangan hospital tourism untuk menghasilkan pelayanan kesehatan berkelas dunia	IE1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54				
			Kesehatan ibu dan anak						
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77,00	10,00				
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,50	5,00				
			Penanganan Tuberkulosis:						
			a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91,00	100,00				
			b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,00	100,00				
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,5				
			2	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan pendidikan secara inklusif dan berkualitas serta pengembangan center of excellence untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berdaya saing global	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:			
						a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
i) Literasi Membaca	9,09-11,09	69,66-71,66							
ii) Numerasi	0,00-2,00	61,50-63,50							
b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minum pada asesment:									
i) Literasi Membaca	29,35-31,35	65,23-67,23							
ii) Numerasi	17,34-19,34	61,02-63,02							
c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86	12,49-12,52							
d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77							
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,84	9,84-10,26							
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,69	75,00							



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	TARGET		KETERANGAN		
				BASELINE 2025	TARGET 2045			
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menuju Universal Social Protection	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29			
			Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,03 (Tahun 2022)	92,52			
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26,00	65,00			
4	Terwujudnya akselerasi pertumbuhan produktivitas ekonomi Provinsi Banten secara inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,82-3,62	34,99-36,13			
			Pengembangan Pariwisata:					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,4	4,07			
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	496,89	1.242,23			
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,43	0,51			
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,9	18,52			
			a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,33	10,00			
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,11	3,95			
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	12,5			
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	5,69			
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,40-7,10	6,30-7,20			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,70	61,60			
Indeks Inovasi Daerah (%)	56,92/Inovatif (Tahun 2023)	85/Sangat Inovatif						
5	Terwujudnya Provinsi Banten dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah	57,58	73,90			
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,04	72,21			
6	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam	IE6. Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,30	7,80			



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	TARGET		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
	penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas					
7	Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten yang maju, kolaboratif serta aktif dalam perdagangan global yang terkoneksi oleh hub logistik nasional dan internasional	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	6,37	4,41	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)			34,40	32,30		
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)			33,60	55,00		
8	Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten dalam menumbuhkan hunian layak, inklusif dan berkelanjutan	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)			24,63	31,1	WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)	
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			67,08	100,00		
Persentase Desa Mandiri (%)			Target akan ditentukan kemudian			
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	89,70	100,00	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,39 (2023)	5,00	
			Indeks Pelayanan Publik	3,99 (2022)	5,00	
			Indeks Integritas Nasional	72,74	87,63	
10			Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	75-100 (Peduli HAM)	75-100 (Peduli HAM)	



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	TARGET		KETERANGAN
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah yang tentram dan tertib berlandaskan kondisi demokrasi yang substansif dan penghormatan hak asasi manusia	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) Indeks Demokrasi Indonesia	55,29 Sedang	72,67 Tinggi	
11	Terwujudnya kestabilan perekonomian di Provinsi Banten	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak terhadap PDRB (%) Tingkat Inflasi Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) c) Nilai Transaksi Saham per Provinsi berupa Nilai Rata-Rata Tahunan d) Total Kredit/PDRB (%) Inklusi Keuangan (%)	2,50 3,30-3,70 33,34 1,13 32.732,80 25,00 91,83	5,00 1,10-3,00 77,20 3,70 161.441,85 66,80 99,02	
12	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah kolaboratif dan berkontribusi pada stabilitas keamanan nasional	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gantar Kawasan	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/sister province (Jumlah) Indeks Ketahanan Nasional	- Cukup Tangguh	8,00 Sangat Tangguh	
13	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah beradab dan berbudaya	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	51,81-51,82 70,68-70,77	63,08-63,56 76,92-77,91	
14	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara dan masyarakat yang inklusif	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	69,76 0,44	74,75-74,78 0,22-0,21	
15	Terwujudnya Provinsi Banten yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kualitas Lingkungan Hidup: a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) c) Pengelolaan Sampah	0,524 52,76 16,00	0,626 53,9 70,00	



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	TARGET		KETERANGAN		
				BASELINE 2025	TARGET 2045			
16	Terwujudnya Provinsi Banten yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, air dan transisi energi berkelanjutan	IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,98 (2022)	90,00			
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	49,16 (2022)	100,00			
			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
			a) Ketahanan Energi					
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2.520,00	3.270,00			
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	200,00	170,00			
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)			2,46	0,51	
			c. Ketahanan Air					
			- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	0,99	15,73			
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,46	100,00			
17	Terwujudnya Provinsi Banten yang maju dan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,21 (2022)	117,77-94,94			
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
			a) Kumulatif	2,26	25,42			
			c) Tahunan	8,93	70,7			

Sumber: Hasil Olahan, 2024

**Tabel V.6
Rangkuman Penyeragaman Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)**

AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045		IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		SASARAN POKOK		
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR		TARGET	
			2025	2045			2.025	2.045
Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif,	IE1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,20	80,54	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam pelayanan
		Kesehatan ibu dan anak			Kesehatan ibu dan anak			



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK		
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET				
			2025	2045		2.025	2.045			
Unggul, dan Berdaya Saing		a). Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115,0	16,0	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	77,00	10,00	kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkualitas serta pengembangan hospital tourism untuk menghasilkan pelayanan kesehatan berkelas dunia		
		b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,50	5,00			
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274,0	76,0	Penanganan Tuberkulosis:		91,00		100,00	
					a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)					
					b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)					
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,77	99,50			
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:	a) Rata-rata nilai PISA		Hasil Pembelajaran:			9,09-11,09	69,66-71,66
a-i Membaca	396,0			485,0	i) Literasi Membaca	0,00-2,00	61,50-63,50			
a-ii Matematika	404,0			490,0	ii) Numerasi					



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
			2025	2045		2.025	2.045	
		a-iii Sains	416,0	487,0	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minum pada asesment:			inklusif dan berkualitas serta pengembangan center of excellence untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berdaya saing global
					i) Literasi Membaca	29,35-31,35	65,23-67,23	
					ii) Numerasi	17,34-19,34	61,02-63,02	
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,00	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,86	12,49-12,52	
		c) Harapan Lama Sekolah	13,37	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31-13,32	14,72-14,77	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,84	9,84-10,26	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,69	75,00	
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,12-3,62	0,04-0,29	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	37,03 (Tahun 2022)	92,52	
		Persentase penyandang disabilitas bekerja	30,0	60,0	Persentase penyandang	26,00	65,00	



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045		IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		SASARAN POKOK		
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR		TARGET	
			2025	2045		2.025	2.045	
Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	di sektor formal (%)			disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Terwujudnya akselerasi pertumbuhan produktivitas ekonomi Provinsi Banten secara inklusif dan berkelanjutan didukung oleh tata ruang, infrastruktur, regulasi, SDM iptek, dan inovasi yang adaptif dengan perkembangan global
		Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,82-3,62	34,99-36,13	
		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata:				
		a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,40	4,07	
		b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18,0	100,0	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	496,89	1.242,23	
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,43	0,51	
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
		a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0	a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,90	18,52	
					a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	5,33	10,00	
		b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,11	3,95	
c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77	12,50			



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
			2025	2045		2.025	2.045	
		d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	5,69	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,40-7,10	6,30-7,20	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,70	61,60	
		Tingkat Penguasaan IPTEK			Indeks Inovasi Daerah (%)	56,92/Inovatif (Tahun 2023)	85/Sangat Inovatif	
		a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3				
		b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar				
	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Terwujudnya Provinsi Banten dalam penerapan potensi ekonomi sirkular menuju wilayah berkelanjutan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam
		a) Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	57,58	73,90	
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,0	70,0	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,04	72,21	
	IE6. Transformasi Digital	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51,0	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,30	7,80	Terwujudnya Provinsi Banten menjadi daerah maju dalam penerapan digitalisasi sebagai penopang daya saing dan produktivitas



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
			2025	2045		2.025	2.045	
IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Biaya Logistik (% PDB)	16,9 (2019)	9,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	6,37	4,41	Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten yang maju, kolaboratif serta aktif dalam perdagangan global yang terkoneksi oleh hub logistik nasional dan internasional
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	34,40	32,30	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26,0	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33,60	55,00	
IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Kota dan Desa Maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Terwujudnya peran strategis Provinsi Banten dalam menumbuhkan hunian layak, inklusif dan berkelanjutan
		a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)	31,1 WM Jakarta (terdiri dari DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur)	
		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak,	64,0	100,0	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	67,08	100,00	



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
			2025	2045		2.025	2.045	
		terjangkau dan berkelanjutan			Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			
		c) Persentase Desa Mandiri (%)	Target akan ditentukan kemudian		Persentase Desa Mandiri (%)	Target akan ditentukan kemudian		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	89,70	100,00	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,39 (2023)	5,00	
		Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (2022)	5,00	
		Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,74	87,63	
		a) Indeks Integritas	71,94 (2022)	96,98				
		b) Indeks Persepsi Korupsi	34,0	60,0				
		Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	75-100 (Peduli HAM)	75-100 (Peduli HAM)	
Mewujudkan Kemananan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	55,29	72,67	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah yang tentram dan tertib berlandaskan kondisi demokrasi yang substansif dan penghormatan hak asasi manusia
		Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	
		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	2,50	5,00	
		Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	Tingkat Inflasi	3,30-3,70	1,10-3,00	
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
Mewujudkan Kemananan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial, dan Perekonomian Daerah yang Stabil	IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200,0	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	33,34	77,20	Terwujudnya kestabilan perekonomian di Provinsi Banten



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
			2025	2045		2.025	2.045	
		b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60,0	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,13	3,70	
		c) Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20,0	c) Nilai Transaksi Saham per Provinsi berupa Nilai Rata- Rata Tahunan	32.732,80	161.441,85	
		d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120,0	d) Total Kredit/PDRB (%)	25,00	66,80	
		e) Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90				
		Inklusi Keuangan (%)	91,0	98,0	Inklusi Keuangan (%)	91,83	99,02	
	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Keamanan Daerah yang Berdaya Gentar Kawasan	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/sister province (Jumlah)	-	8,00	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah kolaboratif dan berkontribusi pada stabilitas keamanan nasional
		Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2023)	45,0	Indeks Ketahanan Nasional	Cukup Tangguh	Sangat Tangguh	
Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradab dan Ekologi yang Lestari	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,81-51,82	63,08-63,56	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah beradab dan berbudaya
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68-70,77	76,92-77,91	
	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,76	74,75-74,78	Terwujudnya Provinsi Banten sebagai daerah dengan keluarga yang berkualitas, gender yang setara
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,44	0,22-0,21	



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045			IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045			SASARAN POKOK
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR	TARGET		
	2025		2045			2.025	2.045	
IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kualitas Lingkungan Hidup: a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,35 (2020)	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,52	0,63	dan masyarakat yang inklusif Terwujudnya Provinsi Banten yang memiliki kualitas hidup inklusif dan lingkungan yang berkelanjutan	
		72,42 (2022)	76,12	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,76	53,90		
		12,5	70,12	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	16,00	70,00		
		15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,98 (2022)	90,00		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	49,16 (2022)	100,00		
IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi b) Prevalensi ketidacukupan pangan (%)	6,61	8,24	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	2.520,00	3.270,00	Terwujudnya Provinsi Banten yang berperan aktif dalam mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian pangan, air dan transisi energi berkelanjutan	
		6,2	2,1	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	2,46	0,51		



AGENDA/MISI	ARAH PEMBANGUNAN (IE)	IUP RPJPN TAHUN 2025-2045		IUP RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045		SASARAN POKOK		
		INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR		TARGET	
			2025	2045		2.025	2.045	
					Undernoursihment) (%)			
		c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air			
		- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	0,99	15,73	
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,46	100,00	
IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,21 (2022)	117,77-94,94	Terwujudnya Provinsi Banten yang maju dan resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
		a) Kumulatif	28,12	51,51	a) Kumulatif	2,26	25,42	
		c) Tahunan	32,65	80,98	b) Tahunan	8,93	70,70	

Sumber: Hasil Olahan, 2024



5.3 SKENARIO PEMBANGUNAN RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

Skenario pembangunan disusun dengan melibatkan proyeksi berbagai kemungkinan atau lintasan untuk pembangunan, berdasarkan berbagai asumsi dan faktor, seperti pertumbuhan populasi, inovasi teknologi, ketersediaan sumber daya alam, investasi infrastruktur, dan keputusan kebijakan. Skenario pembangunan adalah cara untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kemungkinan masa depan untuk wilayah tertentu, dan untuk mengidentifikasi pendorong dan tantangan utama yang dapat membentuk masa depan tersebut. Dalam scenario perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten dirumuskan dua skenario besar yaitu skenario *Business as Usual* (BAU) dan skenario dengan upaya tambahan (intervensi khusus untuk sektor pertanian, pariwisata, dan industri).

5.3.1 SKENARIO BUSINESS AS USUAL (BAU)

Skenario ini mengasumsikan perkembangan Provinsi Banten tidak berubah sebagaimana kondisi periode-periode sebelumnya. Kawasan utara Provinsi Banten (Cilegon, Kabupaten dan Kota Serang) akan tetap menjadi kawasan industri pengolahan berbasis komoditas sedangkan kawasan perkotaan yang berbatasan dengan Jakarta akan menjadi kawasan perdagangan, jasa dan industri pengolahan berkarakter *footloose*.

Berdasarkan hasil analisis dengan pelaksanaan skenario ini jika diterapkan maka ada beberapa kondisi yang akan terjadi di Tahun 2045, diantaranya:

- Capaian IPM Provinsi Banten secara keseluruhan akan berada di angka 83,90 dan rerata IPM kabupaten/kota di Provinsi Banten berada di angka 80,60;
- Capaian TPT Provinsi Banten berada di angka 7,08% dengan rerata kabupaten/kota di Provinsi Banten di angka 7,12%;
- Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten akan berada di angka 5,22% dengan rerata kabupaten/kota di Provinsi Banten di angka 5,78%;



- LPE Provinsi Banten mencatatkan nilai positif, namun nilai ini secara perlahan-lahan mengalami penurunan yang perlu diwaspadai.

Ada beberapa penyebab mengapa hasil proyeksi dari skenario *business as usual* ini menyebabkan data perekonomian tidak seperti yang diharapkan, diantaranya:

- Peningkatan jumlah penduduk dan terkonsentrasinya penduduk di perkotaan di wilayah utara;
- Upah riil meningkat karena peningkatan biaya hidup sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi harian masyarakat;
- Biaya produksi meningkat karena peningkatan harga lahan sebagai akibat keterbatasan lahan;
- Ketimpangan antar wilayah yang menyebabkan perbedaan taraf kesejahteraan juga memicu kontraksi ekonomi karena penurunan kesejahteraan akan berimplikasi kepada penurunan permintaan barang dan jasa yang dalam gilirannya akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat.

5.3.2 SKENARIO BEST CASE (DENGAN UPAYA TAMBAHAN)

Skenario ini dengan asumsi bahwa indikator-indikator makro yang mencatatkan perbaikan dari periode sebelumnya tetap dipertahankan, ketimpangan antar wilayah dikurangi dan distribusi kesejahteraan terus-menerus diupayakan untuk ditingkatkan. Fokus intervensi ditujukan kepada sektor yang memiliki potensial untuk dikembangkan seperti pertanian, pariwisata dan industri.

5.3.2.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI BANTEN

Sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Banten Selatan dan Tengah memiliki kontribusi yang besar terhadap distribusi PDRB ADHB, juga pada sektor ini menyerap lebih banyak tenaga kerja di Banten Selatan dibandingkan sektor lainnya, namun tentunya tetap perlu menjadi perhatian untuk dapat mengurangi ketimpangan



wilayah selatan dengan utara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap **tantangan pengembangan pada sektor pertanian** ini, yaitu:

- Sumber daya manusia di sektor pertanian Provinsi Banten masih memiliki masalah di antaranya dominasi petani tua, lebih dari 60% petani di Provinsi Banten tergolong petani tua (di atas 45 tahun) yang menimbulkan tantangan dalam keterbukaan terhadap teknologi baru, kemampuan dalam berinovasi dan kekuatan fisik atau tenaga yang semakin berkurang;
- Regenerasi petani yang masih rendah, petani muda (di bawah 25 tahun) yang masuk kedalam golongan milenial di Provinsi Banten masih berada pada posisi kurang dari 15%;
- Rendahnya tingkat pendidikan petani, semakin tinggi diharapkan kemampuan berpikir dan menganalisis setiap usaha, daya penalaran dan pola pikir yang lebih baik, serta kecepatan adopsi teknologi dalam melakukan inovasi di bidang pertanian;
- Minimnya pendampingan petani dalam membantu untuk menganalisis masalah-potensi dalam pencarian solusi permasalahan yang terjadi;
- Keterlibatan Perempuan di sektor pertanian di Provinsi Banten yang masih rendah.

Ada beberapa **strategi pengembangan pada sektor pertanian** ini, diantaranya adalah:

- Potensi marine (pesisir dan kelautan) sejauh 12 mil laut yang dapat dikembangkan dengan strategi Institute for Sustainable Oceans, potensi optimalisasi sektor pertanian yang dikembangkan dengan strategi agro technopark yang dikelola oleh kewenangan provinsi;
- Mengusahakan komoditas komersial menjadi lebih potensial (harga dan permintaan yang tinggi) untuk menarik petani muda;



- Membentuk kelompok tani muda agar memiliki ruang gerak lebih leluasa dalam mengembangkan usaha tani serta mendorong pemasaran hasil pertanian berbasis kelompok agar dapat memenuhi kebutuhan industri besar;
- Pelatihan non formal dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah keterampilan usaha tani, adopsi teknologi sederhana yang berdaya guna tinggi, dsb;
- Kerja sama dengan penyuluh swasta dengan sistem kemitraan (dengan industri yang mampu memberikan akses sarana produksi dan/atau menyerap hasil pertanian), meningkatkan penyuluh pertanian pemerintah, serta mendorong munculnya swadaya yang berasal dari petani berprestasi.

5.3.2.2 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN

Dalam konteks skenario pembangunan pariwisata, maka diperlukan analisis terhadap kondisi existing, tren perkembangan di masa lalu dan masa depan yang ingin diperoleh atau diciptakan. Skenario pembangunan pariwisata akan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pendekatan daya tampung pariwisata (*tourism carrying capacity*), dan *supply-demand analysis*. Diharapkan dengan ketiga pendekatan ini maka dapat diperoleh skenario pembangunan yang tepat untuk menghasilkan strategi kebijakan yang lebih praktis dan teknis untuk dapat diimplementasikan.

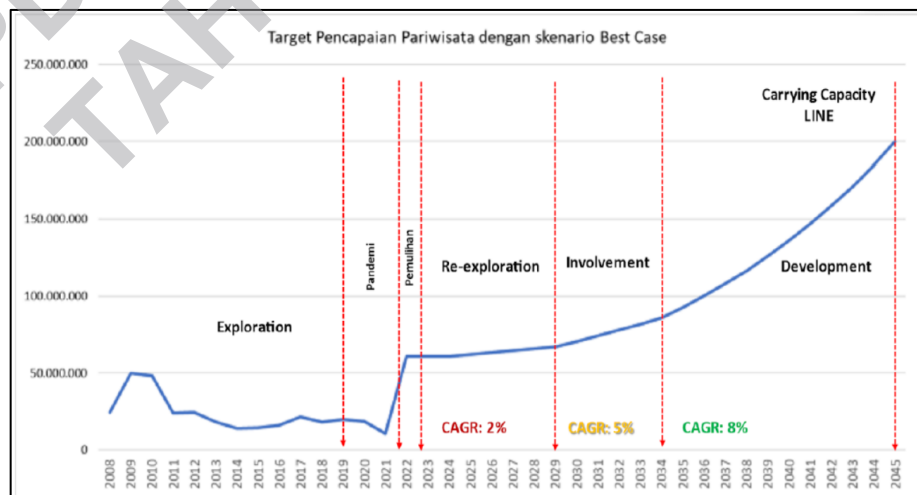
Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap **tantangan pengembangan pada sektor pariwisata** ini, yaitu:

- Posisi Provinsi Banten yang memiliki garis Pantai yang panjang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata Pantai yang potensial, namun juga dengan posisi ini menjadikan wilayah Provinsi Banten berada pada wilayah dengan risiko bencana (khususnya tsunami);

- Lingkungan fisik dan sumber daya alam, kondisi fisik geologi yang memiliki kekhasan di Provinsi Banten ini tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan yang perlu adanya eksplorasi lebih lanjut guna memanfaatkan daya tarik tersebut;
- Masih adanya ketimpangan pembangunan pariwisata Banten Selatan dan Banten Utara;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan pariwisata belum optimal, misalnya fasilitas MICE (*Meeting, Incentives, Conference, Exhibition*), rumah makan dan restoran untuk wisatawan, sekolah khusus vokasi pariwisata, *integrated-tourism information system*, *integrated transportation system* bagi wisatawan.

Ada beberapa **strategi pengembangan pada sektor pariwisata** ini, diantaranya adalah:

- Menyeimbangkan posisi *supply-demand* pariwisata dengan mengoptimalkan elemen pariwisata di destinasi wisata, peluang terhadap Pariwisata Bahari, Pariwisata Perkotaan dan Pariwisata Pedesaan sebagaimana pada gambar di bawah ini;



Gambar V.7
Target Pencapaian Pariwisata Provinsi Banten dengan Skenario Best Case

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)



- Meningkatkan promosi dengan membangun inovasi promosi terintegrasi;
- Mengoptimalkan peran magnet pariwisata Tanjung Lesung;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan dan kolaborasi;
- Mengoptimalkan industri pariwisata dengan menjalin kerja sama antara industri pariwisata di Banten dan ke luar;
- Peningkatan peran masyarakat dalam ikut serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

5.3.2.3 SKENARIO PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI BANTEN

Sektor industri pengolahan menjadi *leading sector* dalam perekonomian Provinsi Banten dimana terlihat dari data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kinerja net ekspor mempengaruhi LPE. Melihat tren tersebut bahwa peningkatan sektor industri pengolahan di Banten Utara dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur perhubungan serta proyek strategis nasional yang beriringan dengan peningkatan investasi dan penanaman modal.

Ada beberapa yang perlu menjadi perhatian khususnya terhadap **tantangan pengembangan pada sektor industri** ini, yaitu:

- Melemahnya daya tarik industri juga mengancam berkurangnya lapangan pekerjaan;
- Sentra produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih rendah;
- Belum ditunjang dengan infrastruktur penghubung (jalan, energi listrik, air bersih dan limbah) sentra produksi dan infrastruktur penunjang industri pengolahan.

Ada beberapa **strategi pengembangan pada sektor industri** ini, diantaranya adalah:

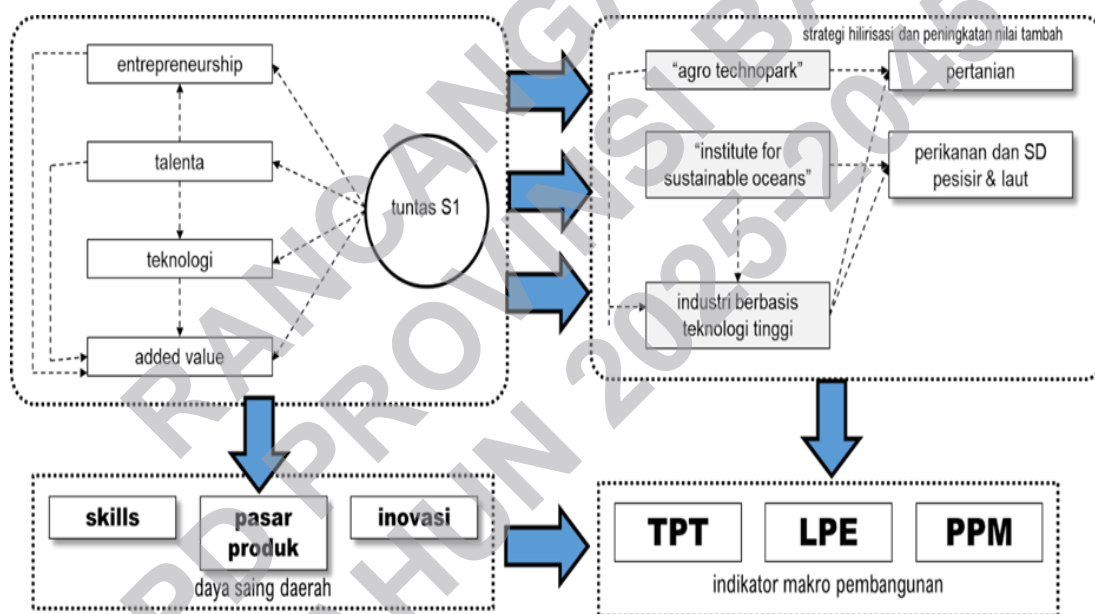


- Kapasitas SDM yang tuntas S1 dan memiliki basis keilmuan dan kewirausahaan untuk mendorong inovasi menciptakan nilai tambah dari sumber daya wilayah Provinsi Banten;
- *Link & match* antara *agrotechnopark (green economy)* dan *institute for sustainable oceans (blue economy)* dengan industri/sector swasta, termasuk pemanfaatan kedua lembaga itu sebagai *business incubator*; dan
- Mekanisme insentif melalui *tax holiday*, *tax abatement* ataupun strategi berbasis tempat untuk meningkatkan daya saing (*enterprise zones/empowerment zones*);
- Peningkatan hasil produksi komoditas utama dan unggulan melalui peningkatan luas lahan dan sarana produksi serta pengembangan kawasan industri teknologi tinggi sebagai strategi hilirisasi komoditas unggulan;
- Peningkatan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung hilirisasi industri tercapai melalui: a). Peningkatan fungsi, peran dan layanan metropolitan Serang-Cilegon yang dipadukan dengan Kawasan Industri Pancapuri dan Pelabuhan Cemindo serta kawasan sekitar pintu gerbang masuk untuk pemeratakan pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Barat Provinsi Banten untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian dan perikanan dan b). Infrastruktur penunjang kawasan untuk memperkuat peran Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda sebagai pintu masuk Regional Jawa dan pusat kegiatan nasional melalui Provinsi Banten;
- Transformasi sektor industri pengolahan terutama di Pancapuri dan Tangerang menuju ke industri teknologi tinggi yang ditunjang dengan kelembagaan riset (R&D) untuk meningkatkan dan memantapkan daya saing daerah Provinsi Banten di tingkat nasional, regional ASEAN dan global dan mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon;

- Peningkatan strategi pemasaran dan distribusi, perlunya *dry port* ataupun *logistic hub* yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan prioritas, sentra industri kecil berbasis komoditas maupun pengembangan minapolitan dan agropolitan.

5.3.3 PEMAJUAN DALAM HARMONI PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

Strategi-strategi yang dijabarkan pada skenario *best case* diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pencapaian target kinerja indikator makro di Provinsi Banten menuju lebih baik, terhadap peningkatan daya saing daerah, penurunan TPT, peningkatan LPE, dan penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar V.8
Strategi Peningkatan Capaian Indikator Makro
(Sumber: Hasil Olahan, 2023)

Dalam perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pada periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Banten dilakukan pemodelan skenario pesimis, moderat, dan optimis untuk pencapaian sasaran target indikator makro. Indikator makro yang dimaksud adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemodelan skenario tersebut

menggunakan *system dynamics* untuk mensimulasikan pencapaian target indikator makro tersebut.

**Tabel V.7
Indikator Makro Pembangunan Di Provinsi Banten**

INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN			
		PERIODE 2025-2029	PERIODE 2030- 20334	PERIODE 2035-2039	PERIODE 2040-2045
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	4,9-6,0	4,6-7,1	4,4-8,0	4,1-8,7
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	75,77	76,0-79,7	77,8-80,0	78,4-80,7	80,8-81,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,52	7,3-6,7	6,6-5,5	6,1-4,5	5,8-3,9
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,24 (2022)	5,2-4,4	4,3-3,7	3,6-3,3	3,0-2,7

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Catatan:

*) BPS, 2024

IPM berdasarkan data UHH hasil Long Form SP2020

RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai pedoman penyusunan RPJPD memuat upaya transformasi, termasuk 20 (dua puluh) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu dalam rencana pembangunan daerah Banten dalam 20 tahun kedepan diarahkan untuk skenario optimis. Pada skenario optimis pencapaian target pada tahun 2045 yaitu LPE mencapai 8,7% per tahun, IPM mencapai 78,9, TPT mencapai 3,90% dan persentase penduduk miskin sebesar 2,7%. Maka dari itu, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang disusun berdasarkan skenario optimis untuk pencapaian akhir visi dan misi Banten tahun 2045. Untuk mendukung pencapaian skenario optimis tersebut maka perlu dirancang indikasi kunci pemajuan Provinsi Banten Tahun 2025-2045 melalui pendekatan transformasi yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu:

5.3.3.1 INDIKASI PROGRAM/PROYEK SUPER PRIORITAS SEKTOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup:

- Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait akses layanan pemerintahan yang didasari oleh berbagai aspirasi masyarakat yang menggaungkan pemekaran wilayah,



beberapa indikasi usulan yang saat ini berkembang diantaranya:

- Kabupaten Pandeglang: Cibaliung dan Caringin;
 - Kabupaten Lebak: Cilangkahan
 - Kabupaten Tangerang: Tangerang Utara dan Tangerang Tengah;
 - Kabupaten Serang: Tanara.
- b. Optimalisasi pelayanan birokrasi (pengembangan Badan Layanan Umum);
- c. Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang cepat dan tangkas.

5.3.3.2 INDIKASI PROGRAM/PROYEK SUPER PRIORITAS SEKTOR SOSIAL

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup:

- a. Pendidikan merupakan Kunci Peradaban, beberapa indikasi pengembangan pendidikan di Provinsi Banten yang memiliki pengaruh kunci diantaranya:
- Pengembangan Untirta menjadi Pusat Unggulan Riset Inovasi Kemajuan dan Keberlanjutan;
 - Pengembaggan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Untuk Riset Inovasi Pembudayaan Iman dan Taqwa;
 - Pengembangan KEK BSD sebagai hub Pendidikan Tinggi Kelas Dunia, Digitalisasi, dan Kesehatan.
- b. Penopang utama aksesibilitas kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menguatkan tingkat kesehatan masyarakat dan berdampak bagi angka harapan hidup. Fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk dikembangkan meliputi:
- Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
 - Rumah Sakit Jiwa;
 - Rumah Sakit Geriatri;
 - Hospital Tourism yang memungkinkan dikembangkan pada KEK Tj. Lesung.



5.3.3.3 INDIKASI PROGRAM/PROYEK SUPER PRIORITAS SEKTOR EKONOMI

Indikasi kunci pada transformasi ini mencangkup:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengurangi inefisiensi waktu dan energi mobilitas barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, meliputi infrastruktur:
 - Jembatan Selat Sunda;
 - Rest Area Laut;
 - Kawasan Industri sekitar Kaki Jembatan Selat Sunda;
 - Pembangunan Terminal Terpadu Merak (Pelabuhan Ferry, Stasiun Kereta Api, dan Terminal Bis);
 - Reorientasi Pengembangan Pelabuhan Merak.
- b. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara, meliputi:
 - Pelabuhan Internasional Bojonegara;
 - Refinery (Kilang Minyak Petrokimia);
 - Tol Cilegon Bojonegara;
 - Rel Kereta Api Tonjong Baru-Bojonegara.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri, meliputi:
 - Kawasan Industri Wilmar (800 Ha);
 - Kawasan Industri Pancapuri (Chandra Asri Fase 2 dan Pengembangan KIEK Fase 3);
 - Kawasan Industri Halal Modern Cikande (3.175 Ha);
 - Kawasan Industri Hijau Cileles (3.100 Ha);
 - Kawasan Industri Hijau Bojong (480 Ha);
 - Kawasan Industri Biru Binuangeun-Cikeusik pada Kecamatan Cikeusik-Cibitung (300 Ha).
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan sekitarnya, meliputi:
 - Kawasan Inti Pemerintahan KP3B (80 Ha);
 - Kawasan Sport Center menuju Sport City (60 Ha).
- e. Pengembangan Kawasan Permukiman Inklusif Maja;



- f. Optimalisasi KEK Pariwisata Tj. Lesung;
- g. Pengembangan *Central Business District* pada Kawasan Pesisir Utara Banten;
- h. Penguatan Kawasan Agrikultur Pangan berkelanjutan Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang;
- i. Pembangunan Jalan Baru dan Konektivitas, meliputi:
 - i. Pembangunan Jalan Baru Metropolitan Serang Raya, diantaranya adalah:
 - Exit Tol Cikeusal-Boru (10,5 Km);
 - Lingkar Selatan Serang Palima-Kramat Watu (19,82 Km);
 - Lingkar Utara Serang Pakupatan-Kramat Watu (10,60 Km);
 - Lingkar Dalam Serang Cipocok-Drangong (12,50 Km).
 - ii. Pembangunan Jalan Baru Penopang Industri alternatif Pariwisata Cilegon-Anyer-Labuan diantaranya:
 - Jalan Pariwisata Alternatif Industri JLS Cilegon-Pasauran Anyer (16 Km); dan atau
 - Jalan Pariwisata Lebak Denok-Mercusuar Anyer (18,1 Km).
- j. Pembangunan Jalan Baru Pandeglang pada Simpang Labuan-Simpang Tenjolahang (4 Km)
- k. Mass Rapid Transportation (MRT) East-West Cikarang-Jakarta-Balaraja (Phase 2 West Balaraja-Kembangan 29,9 Km) dengan potensi pengembangan Balaraja-Merak (70 Km);
- l. Sistem Angkutan Umum Massal Serang Metropolitan Area, mencakup beberapa koridor diantaranya:
 - Koridor 1 Cikande-Cilegon (41,7 Km);
 - Koridor 2 Banten Lama-Baros (18,1 Km);
 - Koridor 3 Alamanda Regency-Untirta Sindangheula (19,5 Km).
- m. Reaktivasi Kereta Api Rangkas Bitung-Saketi-Labuan dan Saketi-Bayah;



- n. Double Track dan Elektrifikasi Rangkasbitung-Merak;
- o. Jalan Tol Baru Tanjung Lesung-Bayah-Pelabuhan Ratu;
- p. Jalan Tol Baru Serang Barat-Rangkasbitung;
- q. Pembangunan Kawasan Affirmasi Banten Selatan, melalui:
 - Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cikeusik-Binuangeun;
 - Pengembangan Wisata Bahari;
 - Pengembangan Riset Kelautan;
 - Pembangunan Kawasan Industri Martim Cikeusik-Cibitung 300 Ha;

5.3.3.4 INDIKASI PROGRAM/PROYEK SUPER PRIORITAS SEKTOR KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

Indikasi kunci pada transformasi ini mencakup:

- a. Optimalisasi Pengembangan Banten Lama
- b. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau Regional
- c. Pembangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 - i. Pembangunan SPAM Karian dan Pemanfaatan potensi ekonomi dan ekologi Waduk Karian;
 - ii. Pembangunan SPAM Sindangheula dan Pemanfaatan Potensi ekonomi dan ekologi Waduk Sindangheula;
 - iii. Pembangunan Bendungan/Waduk Baru, meliputi:
 - Waduk Tanjung 120 Juta m³;
 - Waduk Cilawang 62 Juta m³;
 - Waduk Pasir Kopo 44,5 Juta m³;
 - Bendung Ciliman;
 - Bendung Cibaliung.
- d. Pembangunan Wisata Alam Gunung Aseupan, Karang, Pulosari (Akarsari);
- e. Pembangunan Wisata Alam Taman Hutan Raya (Tahura);
- f. Pembangunan Geopark Bayah Dome;
- g. Pembangunan Geopark Ujung Kulon;
- h. Pembangunan Geopark Rawadano;
- i. Pembangunan TPS3R Regional.



ENERGIZE TO TRANSFORM

BAB VI
PENUTUP



BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran dan/atau mengejewantahkan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 untuk mencapai **Indonesia Emas 2045**.

Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah ini harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selaras dalam aturan tersebut juga dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini juga akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sementara itu untuk mewujudkan kesinambungan antara Provinsi Banten dengan seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Banten perlu adanya kesinambungan mencakup beberapa hal:

- Visi dan misi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten perlu mampu menjabarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Banten disesuaikan karakteristik dan potensi keunggulan daerah;
- Pentahapan periodisasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten selaras dengan RPJPD Provinsi Banten;
- Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi mampu menyesuaikan



substansi RPJPD Provinsi Banten disesuaikan karakteristik dan potensi keunggulan daerah;

- Komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota melalui kepemimpinan Gubernur dan Bupati/Walikota, melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai kekhasan dari masing-masing kabupaten/kota;
- Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan unsur-unsur yang diatur dalam aturan yang berlaku dan melibatkan keterlibatan berbagai pihak *pentahelix* (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media).

Pendekatan-pendekatan perencanaan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih lanjut untuk mencapai impian-impian yang tertuang dalam dokumen ini, perumusan perencanaan juga diarahkan dengan memformulasikan secara SMART, target jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai kondisi yang ada (*relevant*) dan waktu yang jelas (*time*).

6.2 KAJIDAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Banten dalam menunjang ketercapaian Indonesia Emas 2045 dapat dilaksanakan melalui beberapa skema sumber pembiayaan melalui:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Mengutamakan prinsip kebijakan *money follow program*, dimana keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas yang berdampak ganda;
- *Reinventing Government* dalam mendorong pemanfaatan aset sebagai bentuk dukungan kerjasama ekonomi lainnya guna mencapai efisiensi dan efektifitas;
- Kerjasama Pemerintahan dengan Badan Usaha (KPBU);
- Pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri agar dihasilkan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi; dan
- Inovasi pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan lainnya.

6.3 KAJIDAH PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Gubernur.



Gambar VI.1
Kerangka Pengendalian RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
(Sumber: Hasil Olahan, 2024/Adopsi RPJPN Tahun 2025-2045)



a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta pewujudan cita-cita dalam RPJPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain proyek prioritas daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah (mencakup: 1) RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Banten; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya). Pengendalian jangka pendek (mencakup: 1) RKPD Provinsi Banten dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Banten; 2) kesiapan program/proyek prioritas pembangunan daerah; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya).

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pada jangka menengah dan jangka pendek, mencakup: 1) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; 2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; 3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan 4) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Banten.

6.4 KAJIAN MEKANISME PERUBAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dalam keadaan kahir



(*force majeure*) untuk mengantisipasi perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana yang menyebabkan perubahan kondisi daerah yang berdampak terhadap pencapaian RPJPD Provinsi Banten akan dimutakhirkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Secara selaras Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini diinputkan dan diintegrasikan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), maka dalam pelaksanaan mekanisme perubahan dokumen juga perlu diselaraskan dan disinergikan dengan memanfaatkan transformasi digital melalui SIPD untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama untuk menghasilkan satu data yang baik.

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Komunikasi publik penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Banten melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama seluruh Kepala Daerah di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, Kementerian/Lembaga seperti Kemendagri dan Bappenas, Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten, Akademisi di Provinsi Banten dan Sektor Industri dan Sektor Dunia Usaha di Provinsi Banten.

Hilir dari komunikasi publik yang diketahui secara transparan ini diharapkan adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 untuk menjadi **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**, melalui pelaksanaan visi dan misi **Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa.**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

RPJPD PROVINSI BANTEN 2025-2045